

working papers

LABORATORIUM SOSIOLOGI
FISIP UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

Volume 5 Nomor 2, November 2015
ISSN: 1907-5979

PERAN MODAL SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REHABILITASI EKONOMI TERHADAP KOMUNITAS KURBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Suryo Adi Pramono
F.X. Bambang Kusumo Prihandono
St. Nindito

Working Reports

LABORATORIUM SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Jalan Barbasari no 6 Yogyakarta 55281 Indonesia
Kotak Pos 1086 Tlp. +62-274-487711 ext 4420 Fax. +62-274-487748
Website: <http://fisip.uajy.ac.id/labsos> E-mail: kalab_sos@mail.uajy.ac.id



PERAN MODAL SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REHABILITASI EKONOMI
TERHADAP KOMUNITAS KURBAN ERUPSI MERAPI
DI KECAMATAN CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Suryo Adi Pramono
F.X. Bambang Kusumo Prihandono
St. Nindito

LABORATORIUM SOSIOLOGI
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

November 2015

PERAN MODAL SOSIAL DAN KEWIRAUSAHAAN
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
REHABILITASI EKONOMI
TERHADAP KOMUNITAS KURBAN ERUPSI MERAPI
DI KECAMATAN CANGKRINGAN
KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Suryo Adi Pramono
F.X. Bambang Kusumo Prihandono
St. Nindito

LABORATORIUM SOSIOLOGI
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

November 2015

Penulis:

Suryo Adi Pramono
F.X. Bambang Kusumo Prihandono
St. Nindito

Hak Cipta © 2015, pada penulis
Hak Publikasi pada Penerbit Laboratorium Sosiologi
Program Studi Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

*Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi, dari buku
ini dalam bentuk apapun untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari penerbit*

Editor:
Suryo Adi Pramono

Tata Letak Sampul dan Isi Buku:
St. Nindito

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun		19	18	17	16
					15

Penerbit Laboratorium Sosiologi
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Gedung Theresa, Kampus IV, Lantai 4
Jalan Babarsari No. 6 Yogyakarta
Telepon (0274) 48 77 11, Fax. (0274) 580525
Website: <http://fisip.uajy.ac.id/labsos>
Email: kalab_sos@mail.uajy.ac.id

No : Volume 5 Nomor 2, November 2015
ISSN: 1907-5979

PRAKATA

Tulisan ini merupakan hasil kerja kami selama sekitar delapan bulan sejak Maret 2015.. Sebagaimana disebutkan dalam proposal, fokus kerja pada tahun pertama ini adalah pada Desa Umbulharjo. Sedangkan dua desa di Kecamatan Cangkringan ini yang akan kami teliti berikutnya adalah Kepuharjo dan Glagaharjo. Posisi Umbulharjo, Kepuharjo dan Glagaharjo adalah tiga desa tertinggi di Kecamatan Cangkringan yang berbatasan langsung dengan puncak Gunung Merapi yang sangat aktif melakukan erupsi itu. Ketiganya berderet dari barat ke timur dengan dibelah oleh dua sungai besar: Opak dan Gendol. Ketiganya adalah desa-desa terparah yang terkena erupsi Merapi 2010 dan dampaknya sangat besar pada kehidupan warga setempat sehingga banyak dari antara mereka harus direlokasi.

Kami mengawali riset dengan melakukan observasi dengan menyusuri ketiga desa itu. Cara kami menyusuri untuk mengamati perkembangan daerah itu berikut kehidupan usaha dan rehabilitasi ekonomi mereka dengan menyusuri jalan yang berbeda. Kami

mengawali dari barat ke timur, yaitu dari jalan besar menuju Balai Desa Umbulharjo ke arah Desa Kepuharjo dengan melalui jalan utama. Jalan tengah ke Kepuharjo dari Umbulharjo masih rusak. Hanya setelah Sungai Opak sebagian jalan sudah mulai diperkeras dengan cor semen oleh warga selebihnya adalah jalan tanah dan aspal terkelupas. Namun ketika kami ulangi rute ini pada September lalu ternyata jalan telah diperbaiki dan relatif halus semua, kecuali sedikit mengelupas di beberapa ruas jalan. Jalan paling utara, penghubung Kampung Kinahrejo (Dusun Pelemsari, Desa Umbulharjo) dengan Dusun Kaliadem (Desa Kepuharjo) masih tertutup material erupsi. Jalan kedua dari atas, yang menghubungkan sisi atas Dusun Pangukrejo dengan sisi bawah bekas Dusun Kaliadem, sudah bisa dilalui sepeda motor dan jeep meskipun masih sangat jelek. Sedangkan jalan utama dari Balai Desa Umbulharjo ke timurlah yang paling bagus, umumnya dengan aspal halus, karena menjadi jalur utama warga, selain jalan ke utara dari Balai Desa Umbulharjo sampai Dusun Pelemsari yang merupakan dusun tertinggi di desa ini.

Lain kesempatan kami memasukinya dari jalur timur. Kami melalui jalan menuju Desa Glagaharjo. Kami menyusuri jalan ke atas, ke puncak di mana sudah tidak ada lagi rumah, yaitu Lapangan Glagahsari, atau Klangon, di mana hanya ada 4 warung, tiga kamar mandi untuk pengunjung, masjid, gardu pandang dan kincir angin, serta lapangan luas. Itulah destinasi wisata yang menjadi ajang wisata lokal bagi warga sekitar: Klaten dan Yogya.

Di desa ini ada tiga dusun yang warganya tidak mau direlokasi meskipun termasuk Area Terpaan Langsung (ATL) material erupsi Merapi pada 26 Oktober-5 Nopember 2010. Ketiga dusun itu, dari bawah ke atas, adalah Srunen, Kalitengah Kidul dan Kalitengah Lor. Mereka membangun kembali rumah dan hidup dari dukungan hasil alam, berkebun, bertani, berjualan, beternak, dan mencari pasir dan batu di Sungai Gendol yang ada di sisi barat, yang membatasi desa mereka dari Desa Kepuharjo. Kehidupan ekonomi mereka secara sepintas terlihat sudah pulih, demikian pula kesejahteraan ekonomi.

Di waktu lain kami menyusuri jalan tengah di antara ketiga desa itu. Jalur ini kami tempuh melalui Desa Argomulyo ke atas menuju Desa Kepuharjo. Kami menyusuri jalan menuju bekas Hunian Sementara (Huntara) para pengungsi yang kini sudah dijadikan Hunian Tetap (Huntap). Ada 4 huntap di sepanjang jalan dari Desa Argomulyo ke Kepuharjo itu. Kehidupan mereka umumnya seperti suasana perumahan. Mereka berdomisili tak lagi seperti orang desa bertempat tinggal, dengan variasi rumah tradisional Jawa, melainkan dengan format bangunan seperti perumahan di perkotaan. Ada perbedaan desain arsitektural dan besaran ukuran rumah serta lahan. Kehidupan ekonomi tak terlihat lagi seperti keadaan darurat dulu, di masa tanggap darurat pada paruh pertama 2011, kini mereka terlihat mapan. Di beberapa rumah diparkir mobil pribadi, jeep, truk, sepeda motor, yang mengindikasikan bahwa mereka sudah memiliki kepemilikan (*property*) layak, tidak lagi berkekurangan seperti di masa tanggap-darurat di pengungsian atau ketika masih tinggal di huntara dulu. Rumah anyaman bambu (*gedhek*) sudah tidak ada lagi.

Kami juga menyusuri Desa Kepuharjo yang sebagian besar jumlah warganya telah direlokasi ke sejumlah huntap, yaitu terutama warga dari Dusun Kaliadem, Jambu, Kopeng, dan Petung. Dusun Kaliadem, Jambu, Petung kini tak lagi dihuni: warga direlokasi ke beberapa huntap. Suasana sepi. Apa lagi bila penyusuran ini kami lakukan pada malam hari, seperti pada saat riset ini belum dilakukan. Pada pagi hingga petang hari yang terlihat hanyalah truk pengangkut material pasir atau batu, wisatawan berkendara jeep atau trail atau ojek, pencari rumput, warung kecil di beberapa tempat untuk wisatawan dan pekerja pada penambangan pasir dan batu, serta tanaman yang tumbuh alami, termasuk pepohonan. Akan tetapi, keadaan lahan pedusunan sudah hijau, tidak gersang seperti dulu lagi. Pohon akasia mendominasi pertumbuhan aneka tumbuhan lain. Tanaman relawan untuk menghijaukan lahan kalah tinggi pertumbuhannya dibandingkan pohon akasia yang tumbuh alami itu. Bahkan, di beberapa dusun, akasia ini telah dijadikan arang untuk menambah pendapatan ekonomi warga.

Dari aneka amatan itu, yang kami kombinasikan dengan sejumlah wawancara, kami berusaha melacak fokus tulisan ini, yaitu bagaimanakah peran modal sosial (*social capital*) dan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam dinamika rehabilitasi ekonomi pada komunitas terdampak erupsi Merapi di Kecamatan Cangkringan ini. Selain itu kami berusaha untuk merancang format rekayasa sosial seperti apa yang bisa direkomendasikan bagi kebijakan publik ke depan, serta pelajaran apakah yang dapat dirumuskan dan disampaikan kepada komunitas terdampak, baik berdasarkan kegagalan (*lessons learnt*) maupun praktik terbaik (*best practices*), untuk memperkuat upaya rehabilitasi yang mereka lakukan selama ini. Untuk tahun pertama ini, kami berfokus pada Desa Umbulharjo. Format rekayasa sosial lengkap akan kami susun pada tahun ketiga setelah mengetahui potret di ketiga desa terdampak itu.

Pada tulisan ini, data berpijak pada realita di Desa Umbulharjo mengenai tiga hal utama: (1) peran modal sosial; (2) peran kewirausahaan; dan (3) pelajaran yang diperoleh warga dalam upaya rehabilitasi ekonomi: kegagalan dan keberhasilan.

Pada riset yang menjadi sumber penulisan ini ini kami bertiga dibantu oleh lima relawan mahasiswa serta dua kelas yang memiliki kaitan materi. Ini dimaksudkan untuk menghidupi iklim akademik yang hablur antara dosen dan mahasiswa, sebagaimana poin akreditasi menyatakannya. Dengan cara ini pula, mahasiswa dapat belajar langsung mengenai penelitian dosen, sekaligus mendialogkan apa yang dipahami dan dialaminya dalam penelitian dengan materi kelas (dosen dan mahasiswa) serta bacaan literatur (dosen), di samping kultur akademis sesama sivitas akademika secara simultan coba dirajut. Kami berbagi tugas, mendiskusikan hasil, merancang target lapangan lanjutan, dan menulis catatan lapangan, merekam, memotret, mendokumentasikan data, membeli buku-buku terkait, dan menemukan inti capaian riset pada tulisan ini. Laboratorium Sosiologi (Labsos) di mana kami sering berkumpul memang menjadi lebih hidup suasana akademiknya dengan pola riset semacam ini.

Oleh karena itu, penelitian dengan fasilitasi Ditjen Dikti sangat mendukung kami dalam membangun kultur akademik, menghasilkan pengetahuan baru, belajar

terus bagaimana meneliti dan memberikan temuan kami kepada komunitas terdampak serta pengambil kebijakan sebagai masukan akademik.

Akhir kata, dengan prakata ini kami sampaikan apa yang berhasil kami susun, dan mohon maaf bila masih ada kekurangan. Aneka kekurangan adalah tanggung-jawab kami.

Hormat kami

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	23
BAB 3. METODE PENELITIAN	68
BAB 4. MODAL SOSIAL, KWU, REHABILITASI EKONOMI	82
BAB 5. USULAN REKAYASA SOSIAL	118

KESIMPULAN DAN SARAN	137
DAFTAR PUSTAKA	140
BIODATA PENULIS	146

DAFTAR GAMBAR

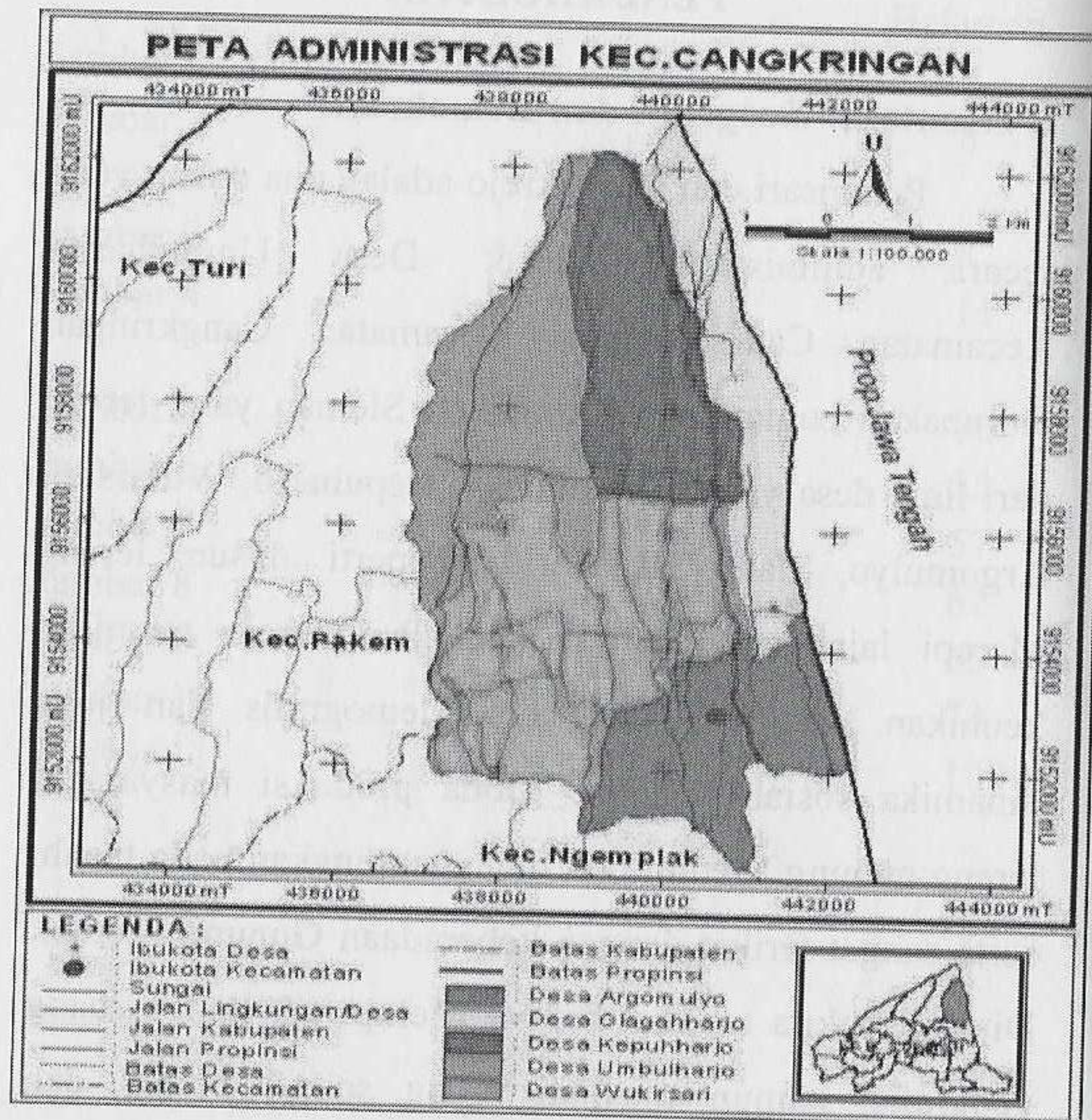
	Halaman
Gambar 1	2
Gambar 2	6
Gambar 3	8
Gambar 4	11
Gambar 5	50
Gambar 6	55
Gambar 7	57
Gambar 8	62
Gambar 9	65
Gambar 10	73
Gambar 11	100

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Konteks: Geografis dan Demografis

Pelemsari dan Pangukrejo adalah dua dusun yang secara administratif masuk Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Kecamatan Cangkringan merupakan bagian dari Kabupaten Sleman yang terdiri dari lima desa yaitu Umbulharjo, Kepuharjo, Wukirsari, Argomulyo, dan Glagaharjo. Seperti dusun lereng Merapi lainnya, Pelemsari dan Pangukrejo memiliki keunikan dari sisi geografis, demografis dan juga dinamika sosial-ekonomi. Moda produksi masyarakat lereng gunung Merapi pun menggantungkan pada tanah, serta sangat terikat dengan keberadaan Gunung Merapi. Di sinilah kita melihat bahwa Merapi tak hanya ruang geografis, namun menjadi ruang sosial, politik dan kultural. Hidup masyarakat lereng Merapi pun terpaut pada keberadaan Merapi. Mereka memandang Merapi tak hanya sebagai gunung, namun lebih sebagai perluasan dari hidup keseharian. Merapi adalah bagian dari kebudayaan mereka.

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Cangkringan.



Sumber : BPS Kecamatan Cangkringan dalam Angka, 2014

Otoritas kultural masyarakat lokal bersumber pada “ideologi” di mana sistem sosial tersebut eksis. Maka, sumber otoritas pun lekat dengan kosmologi. Kosmologi,

dan juga kosmogoni, dianggap sebagai aransemen terus-menerus dari benda dan person, yang mendasarkan pada keberadaan di luar keteraturan. Kosmologi berisi pula harapan atau motivasi yang menggerakkan tindakan dalam kehidupan sehari-hari (Tambiah 1985: 3). Konsekuensinya, proses simbolisme dalam relasi sosial menjadi mediasi antara dunia keseharian dan “imaji dunia yang suci”. “Yang suci” (*the sacred*) adalah sebuah relasi yang berkait dengan asal-usul, dan menemukan relasi konkretnya dalam dunia manusia yang real. Dengan kata lain, “Yang suci” adalah tipe relasi dimana manusia menemukan relasi konkret antara dunia real dan dunia yang tak tampak sebagai asal-usul orientasi kultural. Lebih jauh, Godelier (1999) menyatakan:

The sacred can appear only if something of human beings disappears. What disappears is man as co-author, along with nature, of himself, man as author of his social way of existing, of his social being. For humans are so constituted that they not only live in society, but they produce society in order to live (Godelier, 1999: 71).

Kosmologi dan “Yang Suci” adalah sebuah relasi sosial. Kosmologi dan “Yang Suci”, bahkan, merupakan simbolisme religi pada level ideologi. Pada dimensi ini, segala simbolisme ritual pun terkait dengan keberadaan hak milik publik (*common rights*). Maka, seperti Goody (1962), Bloch (1975), dan Hann (1998) telah mengingatkan kita, bahwa konsep kepemilikan tidak melulu relasi antara manusia dan benda, namun lebih menunjukkan relasi sosial antar manusia terhadap sesuatu barang. Pada pemahaman inilah kita melihat bahwa masyarakat lereng Merapi tak sekedar komunitas yang hidup di sebuah geografis, namun lebih jauh menunjukkan sebuah dasar eksistensi individu dan komunitas. Bagaiamanakah eksistensi *human being* dari masyarakat Merapi beroperasi dalam hidup keseharian?

Konteks geografis, seperti kontur tanah, jenis tanah, ketersediaan air dan saluran irigasi menyebabkan pola produksi suatu wilayah berbeda. Daerah pegunungan, dalam hal ini wilayah Pelemsari dan Pangukrejo, Desa Umbulharjo, lebih mengandalkan sumber pendapatannya bukan dari sawah irigasi. Ketiadaan saluran irigasi dan sulitnya sumber air dari

sumur sendiri menyebabkan para petani lebih mengandalkan ladang dalam produksi pertanian.

Jenis tanaman pun akhirnya juga mengikuti karakter tanah dan sistem saluran irigasi. Tanaman perdagangan dan perkebunan lebih mendominasi dalam ladang-ladang mereka. Salak, kopi, ketela dan jagung lebih banyak ditanam oleh penduduk.

Selain pertanian, penduduk umumnya juga beternak sebagai sumber penghasilan. Sapi dan kambing merupakan andalan dalam pertanian rakyat di daerah pegunungan. Bahkan, tidak jarang para petani memiliki 2 sampai 4 sapi per rumah tangga. Demikian pula kambing, petani akan memelihara kambing sekitar 2-4 ekor. Selain peternakan, para petani bermodal juga akan membuka peluang usaha lain, seperti pertanian jamur dan usaha perdagangan.

Gambar 2. Posisi Gunung Merapi dalam Lanskap Indonesia



Sumber : www.explorevolcanoes.com
(diakses 1 Nov.2015/20.17)

Sistem produksi yang mengandalkan ladang dan peternakan tentu membawa sistem konsumsi berbeda. Para petani di wilayah pegunungan cenderung mengkonsumsi kebutuhan pokok dengan membeli kebutuhan harian di warung-warung sekitar. Mereka tidak membeli di pasar, jikalau membeli itu hanya untuk kalangan petani yang lebih memiliki status ekonomi lebih baik. Letak geografis yang tinggi dan agak jauh dari Pasar Pakem menyebabkan mereka enggan untuk ke pasar dalam berbelanja kebutuhan harian. Selain itu,

tentu letak yang jauh juga menyebabkan ongkos transportasi lebih tinggi.

Seperti apakah sistem ekonomi masyarakat bawah? Berbeda dengan masyarakat pegunungan, masyarakat bawah, khususnya yang tinggal di sekitar aliran sungai Kali Kuning lebih mengandalkan sawah dalam pertaniannya. Sistem sawah jelas dimungkinkan karena ketersediaan air irigasi dari Kali Kuning justru lebih banyak ketimbang dari masyarakat pegunungan. Pola produksi pertanian pun mengalami perbedaan dengan masyarakat pegunungan.

Masyarakat bawah lebih mengandalkan pertanian padi dan palawija. Selain itu, meski tidak semasif masyarakat pegunungan, mereka juga memelihara ternak untuk membantu sistem pertanian. Ketersediaan air yang relatif banyak membuat banyak warga mengusahakan kolam ikan untuk usaha sampingan di samping pertanian. Tanaman perdagangan seperti salak kini mulai dikenal, dan mulai terjadi gerak konversi tanah ke salak sebab hasil dipandang menguntungkan ketimbang hasil padi. Meskipun demikian, pola-pola tanam ini juga tergantung pada luasan tanah yang dimiliki petani. Petani bertanah

luas akan mengkonversi separuh lahan untuk salak dan separuh tetap untuk pertanian padi dan palawija. Sedangkan petani berlahan sempit cenderung akan mempertahankan padi dan palawija, sebab kebutuhan pangan harian akan dipenuhi oleh hasil panen sendiri. Disinilah kita melihat bahwa luas lahan akan mempengaruhi, tak hanya status ekonomi, namun juga pola tanam. Petani gurem cenderung bertindak subsisten dalam menjaga kestabilan ekonomi-sosialnya.

Gambar 3. Foto satelit kawasan Merapi



Sumber, Google Earth, 15.01.2007.

Meskipun ketersediaan air berasal dari saluran irigasi, problem terbesar masyarakat bawah saat ini adalah penjualan lahan kepada masyarakat luar. Beban konsumsi yang tinggi menyebabkan masyarakat bawah cenderung gampang menjual tanah. Pada titik inilah, kita juga melihat bahwa tingkah laku konsumsi juga dipengaruhi oleh geografis. Kedekatan dengan kota kecamatan pun kiranya juga memudahkan masyarakat memperoleh berbagai akses. Kemudahan ini membawa dampak pada meningkatnya pola konsumsi masyarakat.

Seperti halnya studi Hefner pada masyarakat Tengger, dalam buku klasiknya *The Political Economy of Mountain Java* (1993), dimana dua moda produksi masyarakat atas dan bawah berbeda dan berimplikasi pada dua perbedaan kultural, demikian pula di lereng Merapi. Masyarakat atas dan bawah memiliki perbedaan. Namun perbedaan yang paling menyolok adalah bagaimana masyarakat membangun asosiasi, jejaring, modal sosial yang terintegrasi menjadi modal ekonomi, kultural dan politik. Kiranya, aneka modal inilah juga yang mempengaruhi kesiapan komunitas untuk bangkit pasca bencana.

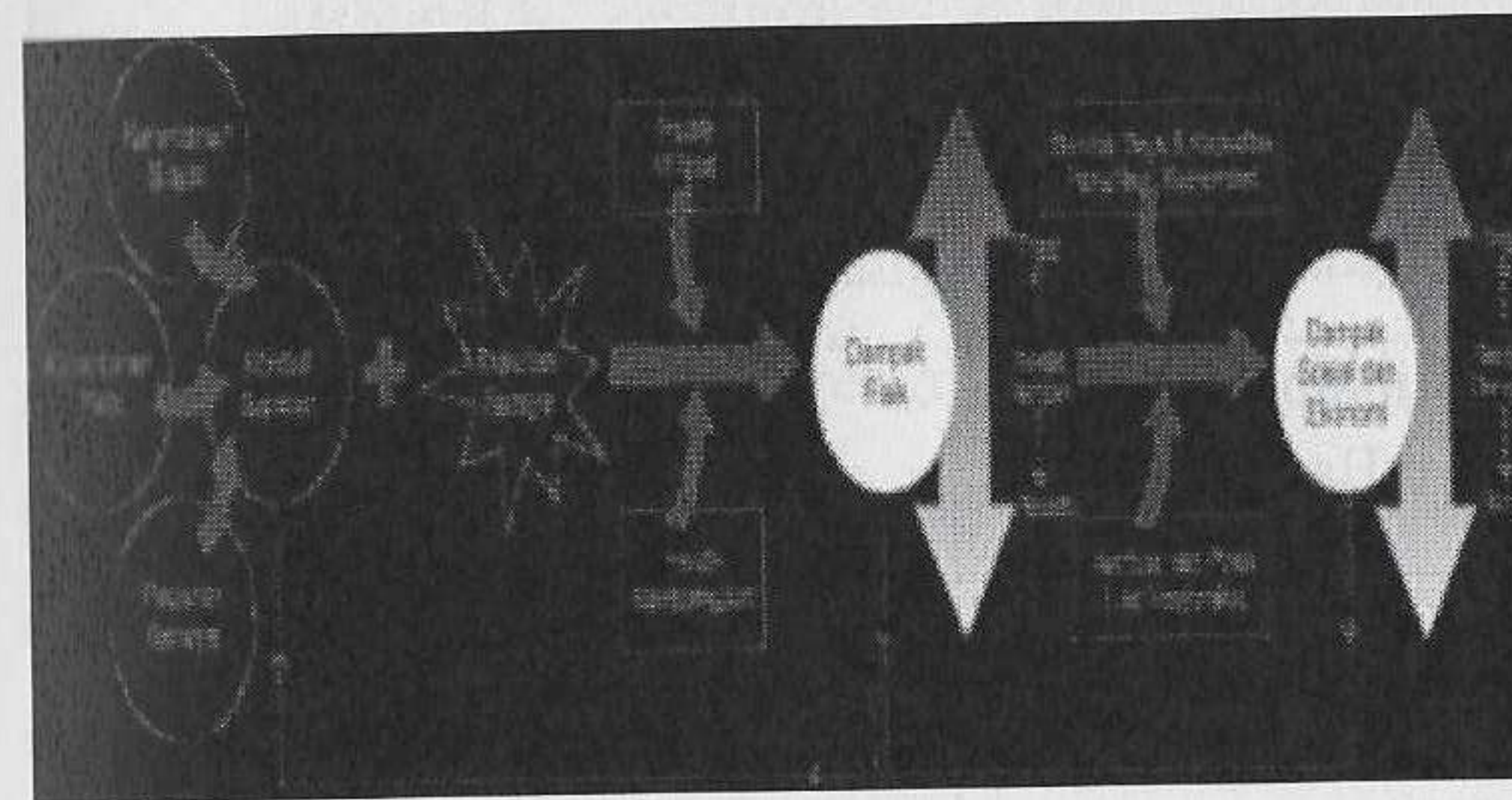
Moda asosiasi, moda berjejaring, seperti diungkap oleh Latour (2014) tetaplah bersumber pada jantung persoalan eksistensi. Pada titik inilah kita memahami bahwa moda produksi tak bisa lepas dari jejaring struktur, senantiasa *embedded* dalam jejaring sosial. Jejaring ini, pada gilirannya, memberikan *structural meaning*, tafsir makna bagi landasan tingkah laku sosial warga/individu. Dan sebaliknya, individu pun meluaskan pola-pola eksistensi, sekaligus mengkonstruksi struktur baru yang merentang dari soal ekonomi sampai Merapi.

Erupsi Merapi: mengubah segalanya? Bencana Merapi tahun 2010 adalah bencana dahsyat yang mengubah segalanya. Pola ruang, yang gayut dengan geografis, pun mendeterminasi pola-pola tingkah laku masyarakat yang berbasis pada demografis.

Wilayah Desa Umbulharjo pun mengalami pergeseran luar biasa. Letak geografis yang sangat dekat dengan sumber bencana erupsi, kawah Merapi, menyebabkan komposisi padukuhan internal Desa Umbulharjo mengalami pergeseran yang luar biasa. Yang lama hilang, yang baru lahir. Padukuhan Pelemsari

dan Pengukrejo lama hilang, lalu muncullah kedua pedukuhan itu di lokasi baru, relokasi, yaitu: Karangkendal dan Plosokerep.

Gambar 4. Alur Dampak Fisik dan Sosial-Ekonomi



Sumber: Wimbardana, 2014:7

Sebagian besar penduduk Kecamatan Cangkringan adalah peternak. Dari data monografi kecamatan tercatat 13.224 orang atau 47,81% penduduk Kecamatan Cangkringan bekerja di sektor peternakan. Meski demikian, industri kecil juga tumbuh di Desa Umbulharjo, meskipun bisa juga dikatakan belum berkembang pesat.

Studi dari Harwati, dkk. (dppm.uui.ac.id, diakses 27 Oktober 2015) menunjukkan bahwa industri kecil di

Umbulharjo pasca erupsi mengalami kerusakan berat, sedang dan bahkan hilang.

Tabel 1. Kondisi Industri Umbulharjo Pasca Erupsi

Kelompok Industri	Jumlah	Kondisi
Pengolahan Batu/Pasir	10	Rusak Berat/Hilang
Kerajinan Kayu/Bambu	4	Rusak Berat/Hilang
Makanan/Tempe	2	Rusak Berat/Hilang

Sumber: Harwati, 2012.

Riset yang mendasari tulisan ini pun berangkat dari persoalan ini, ketika disaster, bencana, yang berupa erupsi menyebabkan rusaknya atau hilangnya sebuah moda dan modal produksi, dimana bisa dikatakan semua bagian pedukuhan teratas Desa Umbulharjo ini 100% rusak, bagaimanakah masyarakat beradaptasi dengan persoalan bencana tersebut? Juga, bagaimanakah masyarakat berubah, beradaptasi dan menciptakan moda produksi baru? Untuk menjawab persoalan tersebut, kami melakukan riset, mengeksplorasi konteks

perubahan struktur, risiko struktur, persepsi aktor, dan strategi aktor dalam beradaptasi. Secara lebih tertata, hal ini disampaikan pada bagian permasalahan.

1.1. Latar Belakang

Ada beberapa hal yang melatari tulisan ini. Pertama, sejumlah studi tentang Gunung Merapi dan manusia yang tinggal di lerengnya, berikut (dampak) bencana erupsi yang terjadi, telah dilakukan oleh sejumlah peneliti namun umumnya bersifat mono-disipliner. Kalaupun ada yang bersifat multi perspektif, misalnya sosial, kultural dan teologis (Pramono, 2010), itupun dilakukan oleh seorang peneliti; bukan oleh tim yang memang memiliki lebih dari satu disiplin ilmu. Kajian interdisipliner lain berkaitan dengan solusi sosio-yuridis terhadap warga penolak relokasi di Desa Balerante dan Glagaharjo (Wisnubroto, dkk, 2012). Sementara sebuah tulisan oleh tim dan bersifat multidisipliner yang pernah ada, misalnya oleh Paripurno, dkk. (2006), ternyata lebih bersifat kumpulan tulisan aktivis LSM dan relawan kemanusiaan, bukan berasal dari satu riset utuh bersama. Kajian oleh tim yang

pernah ada umumnya dilakukan secara monodisipliner. Sebab itu, untuk mendukung hal-hal tersebut, riset ini ditulis secara ragam perspektif oleh beberapa peneliti, yang meskipun berasal dari prodi yang sama, para peneliti sejatinya berasal dari perspektif ilmu yang berbeda: sosiologi dan ilmu politik.

Kedua, hal ini merupakan kelanjutan kegiatan para peneliti yang pernah terlibat dalam aksi kemanusiaan dan aktivitas akademik berkaitan dengan bencana Merapi.

Ketiga, berkaitan dengan orientasi riset universitas yang di antaranya adalah melakukan kajian berkaitan dengan kebencanaan, maka riset ini --meskipun bukan masuk ke dalam skema Riset Unggulan Perguruan Tinggi, melainkan kami pilih skema Hibah Bersaing-- adalah tanggapan terhadap kebijakan riset ini dengan berorientasi pada hasil yang bersifat segera, yaitu perumusan usulan kebijakan berupa rekayasa sosial tentang rehabilitasi ekonomi pada komunitas terdampak bencana, terutama bencana erupsi, seperti di lereng selatan Gunung Merapi ini. Ke depan, dalam prakiraan Badan Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi

Kegunungapian (BPPTK), arah erupsi akan menuju selatan (karena bukaan besar kawah ada di sisi selatan) sehingga kajian terhadap komunitas di sisi selatan gunung ini menjadi urgen. Oleh karena itu, hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya perkuatan riset pada satu dari tiga fokus riset institusi kami: kearifan lokal, multikulturalisme, dan kebencanaan, dengan tetap mengacu pada kekhasan skema riset Hibah Bersaing. Hasil riset itu yang kami tulis menjadi *working paper* ini.

Keempat, riset di lokasi Gunung Merapi merupakan lanjutan riset sivitas akademika pada program studi. Lucinda dan Suryo (2002), misalnya, pernah meneliti tentang wisata di Selo. Bambang Kusumo (2007) meneliti tentang distribusi air Umbul Wadon di Kali Kuning. Suryo (2008-kini) masih meneliti tentang Paguyuban Sabuk Gunung Merapi. Suryo (2009-2010) meneliti dan menulis tentang kesiapsiagaan bencana di Desa Sidorejo dan Tegalmulyo, Kemalang, Klaten, yang diterbitkan oleh CRCS UGM dan Mizan (2012). Lucinda (2011) meneliti tentang penataan kembali pariwisata DIY setelah erupsi Merapi 2010. Suryo (bersama tim PSHD UAJY yang diketuai oleh Wisnubroto, 2012) mengkaji

tentang solusi alternatif sosio-yuridis bagi warga tempatan penolak relokasi (didanai oleh Ditjen Dikti), dan telah diterbitkan dalam prosiding Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) dan Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI). Secara demikian, kajian ini memiliki tautan dengan aneka riset sivitas akademika program studi kami sebelumnya.

Kelima, meskipun kajian ini secara lokasi bertautan dengan kajian dengan fokus fenomena Gunung Merapi secara umum, namun kajian yang berkaitan dengan aspek rehabilitasi ekonomi pasca bencana erupsi ini dimaksudkan pula sebagai awal untuk membuat irisan *roadmap* penelitian lain yang berfokus pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagai ekspresi keprihatinan sivitas akademika terhadap fenomena kemiskinan yang masih mendera bangsa ini. Namun untuk mempertautkannya dengan orientasi riset universitas, fokus UMKM itu sedapat mungkin akan kami kaitkan pula dengan kearifan lokal, multikulturalisme dan kebencanaan. Kajian ini untuk mengakomodasi pula orientasi riset program studi yang berorientasi pada kajian bisnis dan media. Secara

demikian, kajian bisnis ini, di mana kami memilih fokus pada UMKM, akan kami tautkan dengan salah satu tiga fokus orientasi riset universitas itu: kebencanaan, dan keprihatinan nasional tentang kemiskinan. Dengan demikian, secara kelembagaan, kajian kali ini berada pada irisan antara orientasi riset Program Studi Sosiologi dan LPPM UAJY. Melalui riset inilah kami akan mengawali *roadmap* kajian bisnis pada program studi kami.

1.2. Permasalahan

Tulisan ini hendak membahas empat hal. Pertama, bagaimanakah peran modal sosial (*social capital*) dalam dinamika rehabilitasi ekonomi pada komunitas terdampak erupsi Merapi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, DIY?

Kedua, sejauh mana kewirausahaan tumbuh dan berpengaruh dalam proses rehabilitasi ekonomi tersebut?

Ketiga, format rekayasa sosial seperti apa yang bisa direkomendasikan bagi kebijakan publik ke depan dengan mengkaji proses rehabilitasi ekonomi yang telah dilakukan oleh komunitas terdampak?

Keempat, pelajaran apakah yang dapat dirumuskan dan disampaikan kepada komunitas terdampak, baik berdasarkan kegagalan (*lessons learnt*) maupun praktik terbaik (*best practices*), untuk memperkuat upaya rehabilitasi yang mereka lakukan selama ini?

Keempat hal inilah yang memandu kami “bergerak” dan sebagian hasilnya kami sampaikan pada tulisan ini.

1.3. Urgensi

Keempat pertanyaan di atas berkaitan dengan empat urgensi berikut ini. Pertama, berkaitan dengan pengembangan ilmu, kajian interdisipliner, terutama kombinasi perspektif sosiologis dan politik, dalam studi rehabilitasi ekonomi pasca bencana ternyata belum kami temukan. UII telah melakukannya tetapi lebih berfokus pada perspektif ekonomi. Ketika salah seorang anggota tim peneliti ini didanai untuk melakukan studi kebencanaan, dengan dukungan dana dan fasilitasi CRCS UGM, pendekatan yang dipakai adalah sosial, budaya dan agama. Ada lebih dari dua puluh studi tentang

kebencanaan pada tahun 2009-2010 menggunakan perspektif inter atau multidisipliner itu. Bacaan kami di sejumlah literatur umumnya lebih bersifat monodisipliner, yang umumnya banyak dilakukan oleh ilmuwan eksakta pada disiplin ilmu geologi (termasuk vulkanologi), teknik dan geografi. Telaah multidisipliner semacam ini atas fenomena ekonomi pasca bencana masih tergolong baru dan langka. Kajian serupa oleh Dahles (1998) dan Setiawati (2010) lebih bersifat monodisipliner, yaitu kajian antropologis terhadap kewirausahaan pelaku wisata setelah krisis (yaitu krisis moneter, 1998; serta bencana gempa bumi dan erupsi, 2006): *livelihood* pasca krisis karena bencana. Oleh sebab itu, kajian interdisipliner urgen untuk dilakukan untuk membangun kultur penelitian yang baru pada ranah subyek penelitian yang kian beragam.

Kedua, secara lebih khusus, kajian tentang dampak bencana vulkanik dengan perspektif semacam ini juga merupakan hal baru dan kalau pun ada, bila kami menemukan literatur dan artikel jurnal relevan, masih bersifat langka. Maka kajian dengan perspektif ini diharapkan dapat memberikan kebaruan, justru ketika

persoalan rehabilitasi ekonomi cukup banyak menjadi fokus kegiatan para warga terdampak. Banyak aktivitas pendampingan ekonomi dilakukan tetapi kajian terhadap seluruh proses itu bertautan dengan rehabilitasi ekonomi secara umum kiranya belum dilakukan. Kajian mengenai *lavatour* (Ahimsa-Putra, 2012) telah dilakukan, namun kajian itu belum menyentuh proses dan capaian rehabilitasi ekonomi secara utuh di beberapa hunian tetap. Kajian itu lebih banyak menyoroti *lavatour* Umbulharjo (terutama Kinahrejo dan Pangukrejo) sebagai tujuan wisata bencana dan bagaimanakah seharusnya mengelolanya secara lebih baik.

Ketiga, kajian semacam ini juga merupakan upaya pengembangan institusi kami yang lebih banyak melakukan kajian monodisipliner, sementara itu kecenderungan kajian internasional yang terekam dalam aneka jurnal justru bersifat inter atau bahkan multidisipliner untuk menghasilkan tulisan riset dan artikel jurnal yang kian mendekati problema realita yang tidak pernah bersifat mono-perspektif atau aspek, melainkan multi aspek atau faset. Ini urgen dilakukan justru ketika Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY tengah

mengawali penentuan *cluster* penelitian: Bisnis dan Media, sehingga riset inter dan multidisipliner akan dapat dijadikan paradigma penelitian yang baru dan sekaligus merupakan langkah awal untuk membangun kultur penelitian lintas atau bahkan multidisiplin di lembaga kami ini.

Keempat, penelitian ini bersifat urgen bagi kami karena kami tengah mengawali format baru penelitian integratif, yang akan mengacu pada aneka produk yang berasal dari penelitian yang sama. Aneka produk itu adalah tulisan laporan riset, publikasi (booklet dan *working paper*), film dokumenter, penulisan modul matakuliah (Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup), penulisan proposal pengabdian pada masyarakat. Aktivitas ini pun akan dirancang untuk dikaitkan dengan agenda aktivitas perkuliahan terkait pada semester berjalan, sehingga lokasi penelitian sekaligus "laboratorium" bagi pembelajaran mahasiswa pada matakuliah terkait, misalnya: Metode Penelitian Kualitatif, *Community Development*, Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup, Analisis Sosial, Riset Bisnis, dan Sosiologi Organisasi. Kami akan rancang detail aktivitas

dan kemungkinannya berdasarkan rapat program studi dan laboratorium dengan para pengampu dan mahasiswa. Film dokumentar dan modul mata-kuliah sedang kami rancang penyelesaiannya.

1.4. Target Temuan

Target temuan tulisan kami adalah untuk (1) mengetahui apakah modal sosial dan kewirausahaan berperan dalam proses rehabilitasi ekonomi komunitas terdampak pasca bencana erupsi; (2) menyusun format rekayasa sosial berbasis proses rehabilitasi ekonomi tersebut sebagai masukan kebijakan publik; dan (3) memberikan *lessons learnt* serta *best practices* kepada komunitas tempatan mengenai perbaikan proses rehabilitasi ekonomi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Demikianlah orientasi tulisan ini.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Apakah kaitan bencana dan perubahan struktur dalam konteks kebencanaan? Bencana, kiranya, dapat didefinisikan sebagai ancaman yang telah merusak keberlangsungan atau keberlanjutan *livelihoods* dan manusia. Dengan kata lain, bencana alam seperti gunung meletus, erupsi, gempa bumi, tsunami atau angin puting beliung, dan sebagainya selalu menerpa mengubah alam sekaligus mengubah dunia sosial-ekonomi manusia. Bahkan secara kultural, dalam masyarakat Asia, seperti ditengarai oleh Dove (2008), bahwa bencana menciptakan persepsi *kultural-politiko*, bahwa bencana adalah tanda untuk terjadinya perubahan politik.

Dalam dunia sosial, bencana membawa ancaman sekaligus menciptakan ketidak-stabilan, bahkan hancurnya pola-pola asosiasi ketetanggaan, bahkan pemerintahan. Studi kami ketika terjadi bencana dan saat pasca bencana menunjukkan fenomena bahwa ketika terjadi bencana, hal pertama yang dipikirkan setiap warga adalah „menyelematkan diri“. Mengungsi. Semua

warga, kaya-miskin, tak peduli statusnya, mengungsi. Pada saat mengungsi inilah terlihat bahwa warga pun mengalami terpecah-pecah, mengalami dis-integrasi. Banyak warga kehilangan tetangga, tak mengetahui keberadaan tetangganya. Terlebih bagi warga yang berasal dari kelas sosial menengah ke atas, mereka memiliki pilihan-pilihan tempat untuk mengungsi, mulai dari saudara jauh sampai mengungsi secara mandiri. Kondisi ini tentu saja menjadikan proses pengungsian sebagai sarana untuk proses segregasi dan dis-integrasi komunitas.

Dunia ekonomi pun menjadi hal yang tak terelakkan. Bencana menghancurkan sistem produksi dan konsumsi masyarakat. Kerugian ekonomi pun tak terelakkan. Bencana mampu menghancurkan sumber ekonomi, dan bahkan sistem ekonomi yang menopang hidup komunitas. Alasan ini pulalah yang melandaasi kenapa masyarakat demikian sulit meninggalkan dusun untuk mengungsi. Mereka senantiasa mempertimbangkan aset-aset seperti ternak yang menjadi sumber penghasilan. Mengungsi dianggap semata menyelamatkan nyawa, namun tidak secara ekonomi.masyarakat

lereng Merapi yang sebagian besar sebagai peternak, pun merasakan betul dampak bencana erupsi.

2.1. State of the Art

Kajian ini pertama-tama perlu diletakkan pada kajian sebelumnya yang bertautan dengan Gunung Merapi. Laksono (1985) meneliti Desa Sempal atau Bendangmakmur di lereng barat daya gunung ini dengan menggunakan perspektif komparatif. Ia berhasil mengidentifikasi perbedaan persepsi antara penduduk setempat dan pemerintah mengenai bahaya Merapi dan signifikansi transmigrasi ke Sumatera. Perbedaan ini lebih disebabkan oleh arti relatif yang dikenakan pada ancaman itu daripada oleh kesalahan kalkulasi. Penduduk desa tidak mengabaikan atau menolak arti penting ancaman gunung Merapi ini, tetapi mereka hanya tidak menganggapnya cukup penting sebagai alasan untuk pindah dari gunung ini. Informasi para transmigran di Sumatera membawa penduduk pada persepsi bahwa bencana di daerah transmigrasi baru lebih besar dan hidup di sana lebih berat daripada di lereng Merapi. Sedangkan pemerintah memandang

bahwa daripada ada kurban jiwa karena bencana Merapi maka lebih baik mentransmigrasikan penduduk ke lokasi lain yang lebih baik dan aman. Perbandingan dari kedua pandangan ini menunjukkan bahwa tidak hanya kedua pandangan ini berbeda, tetapi juga masing-masing memiliki ketepatan tertentu. Laksono (1985: 210) menunjukkan bahwa pokok sesungguhnya dari perbandingan ini adalah bahwa semua evaluasi semacam ini sampai tingkat tertentu akhirnya bersifat subyektif, kecondongan tertentu bervariasi dari kasus ke kasus, tergantung siapa yang membuat evaluasi dan untuk tujuan apa. Ia lalu menyarankan kepada kedua pihak bahwa ada unsur-unsur obyektif (maupun subyektif) dalam perkiraan penduduk desa mengenai bencana-bencana gunung berapi, dan juga ada unsur-unsur subyektif (maupun obyektif) dalam perkiraan pemerintah.

Dengan alur nalar serupa dengan kajian Laksono (1985) di atas, Triyoga (1991) meneliti tentang persepsi dan kepercayaan manusia Jawa terhadap Gunung Merapi dan mempertautkannya pula dengan kebijakan transmigrasi pemerintah untuk menyelamatkan warga

lereng gunung ini yang diancam bahaya bencana erupsi. Berbeda dari Laksono (1985) yang mendasarkan temuannya pada sebuah desa, Triyoga mengkaji 3 desa berbeda (dua di selatan gunung dan satu di utara gunung) untuk menarasikan temuannya. Sikap dan tindakan penduduk setempat lebih banyak diwarnai oleh pengetahuan lokal tradisional yang tersimpan di dalam sistem kepercayaan mereka. Sedangkan pemerintah cenderung mendasarkan sikap dan tindakannya pada studi vulkanologi yang bersifat preventif, yaitu berusaha menekan jumlah kurban dan kerugian bencana alam Merapi (2001: 128). Senada dengan temuan Laksono (1985) di atas, Triyoga (2001) menulis bahwa perbandingan dari kedua pihak di atas menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki ketepatan dan kepastian sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh Merapi. Usaha pentransmigrasian warga dinilai belum dapat dikatakan berhasil karena pemerintah belum mampu untuk memahami sistem kepercayaan setempat dan cara-cara penduduk setempat mempergunakan sistem kepercayaan mereka untuk beradaptasi terhadap Merapi. Ia menyarankan agar

pemerintah tidak perlu melulu mengejar target transmigrasi dengan memindahkan penduduk lereng Merapi itu, tetapi seyogyanya melibatkan penduduk setempat dalam mengatasi dampak bencana Merapi dan aneka program pemerintah untuk melestarikan hutan-hutan Merapi berdasarkan rasa memiliki dan tanggung-jawab. Selain itu, ia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan dana dan membimbing mereka dalam meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam pengembangan teknologi dan ekonomi setempat, daripada dana itu dipakai untuk program transmigrasi terhadap warga setempat yang kurang tepat dan memboroskan biaya. Kajian kedua peneliti di atas memiliki kemiripan yaitu mempertautkan wilayah “makna” (sistem kepercayaan) dan “kebijakan” (program transmigrasi).

Kajian berikutnya dilakukan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra (2000) mengenai aneka tafsir terhadap bencana Merapi pada tahun 1994 yang mengenai Dusun Turgo (lereng selatan Merapi). Mengikuti Geertz (1973), ia menggunakan pendekatan interpretif untuk memunculkan tafsir baru atas tafsir-tafsir tentang

meletusnya Gunung Merapi yang disampaikan berbagai pihak yang dimuat dalam media massa cetak. Berbeda dari kedua peneliti sebelumnya yang meneliti di tengah penduduk (*fieldwork*), Ahimsa-Putra (2000) melakukan kajian teks. “Teks” yang dibaca dan ditafsir dipahami juga merupakan (dan memuat) peristiwa-peristiwa sosial.

Dari data teks ia mengelompokkan adanya tiga jenis tafsir yang berasal dari golongan sosial yang berbeda: (1) tafsir peringatan dimunculkan oleh tokoh-tokoh spiritual, baik Jawa maupun Islam; (2) tafsir cobaan dikemukakan oleh para pejabat pemerintahan; dan (3) tafsir takdir yang muncul dari mereka yang tertimpa bencana, rakyat biasa. Tafsir peringatan mengatakan bahwa bencana Merapi merupakan peringatan dari Tuhan bagi manusia agar manusia meninggalkan perilaku yang tidak baik dan melaksanakan aturan-aturan moral sebagaimana diperintahkan Tuhan. Dalam tafsir cobaan memberikan dorongan kepada penduduk di lereng Merapi agar tetap bisa sabar dan tawakal dalam menghadapi bencana. Sedangkan tafsir takdir menyatakan bahwa apa yang telah terjadi adalah kehendak dan urusan Tuhan yang

tidak mampu ditolak oleh manusia. Oleh karena itu sikap yang muncul adalah bagaimana menerima tersebut apa adanya. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun kembali kehidupan yang porak-poranda ke depan, bagaimana mempertahankan apa yang masih dimiliki dan tidak harus pindah dari desa mereka.

Dari analisis itu, ia menunjukkan ada dua hal penting. Pertama, ada pertarungan tafsir tentang bencana Merapi, yang olehnya dikaitkan dengan pertarungan tafsir yang berasal dari Tradisi Besar dan Tradisi Kecil (istilah Robert Redfield). Tafsir pertama dan kedua berasal dari kalangan elite yang dikelompokkan ke dalam Tradisi Besar, sedangkan tafsir ketiga yang berasal dari rakyat biasa yang terkena bencana Merapi digolongkan ke dalam Tradisi Kecil. Tafsir siapa yang kuat dan akan diterima bersama, baik secara sukarela maupun terpaksa, sama-sama tidak diketahui. Kedua, bila wacana di atas dapat dianggap mewakili pandangan orang Indonesia secara umum, maka itu menunjukkan bahwa pola pikir orang Indonesia belumlah merupakan pola pikir analitis “ilmiah”. Ia berharap bahwa orang Indonesia masih harus banyak belajar untuk

menganalisis peristiwa alam secara “ilmiah” dengan nalar “modern” dan tidak melihatnya dengan nalar “primitif” yang mempertautkan bencana alam dengan moral dan politik secara holistik.

Mengambil subyek kajian yang sama dengan Ahimsa-Putra (2000), yaitu penduduk Turgo yang terkena bencana erupsi Merapi pada tahun 1994, Paripurno dkk (2006)¹ mencoba mendengarkan, mengumpulkan dan menjadikan tuturan para kurban di dusun itu menjadi sebuah buku. Mirip dengan Laksono (1985) dan Triyoga (1991), Paripurno dkk hadir di tengah subyek kajian. Berbeda dari ketiganya yang memosisikan diri sebagai peneliti dari kalangan kampus, mereka ini hadir di tengah pengungsi lebih sebagai relawan kampus dan LSM yang memiliki latar belakang pecinta alam. Buku ini berisi dari sejumlah tulisan yang ditulis oleh penulis yang beraneka latar-belakang disiplin ilmu, misalnya geologi/vulkanologi, biologi, komunikasi, agama Islam, dan ekonomi studi pembangunan. Tulisan merupakan kombinasi tentang

¹ Buku yang saya baca adalah cetakan kedua dari buku ini yang terbit pertama kali pada tahun 1999 (cetakan pertama).

cerita derita yang dialami para pengungsi kurban bencana, sistem peringatan dini, peran lembaga-lembaga pemerintah, LSM dan relawan, serta tawaran manajemen penanggulangan bencana yang menempatkan korban sebagai subyek, bukan obyek sebagaimana dilakukan banyak pihak, terutama pemerintah. Orang luar mendominasi peran di seluruh proses manajemen penanggulangan bencana dan kurban diposisikan sebagai obyek, atau bila dilibatkan hanya sebatas sebagai pelaksana.

Tulisan ini lebih merupakan advokasi kebijakan dengan mengkritisi aneka kelemahan dalam manajemen penanggulangan bencana, dan menawarkan manajemen penanggulangan bencana dengan mekanisme internal yang menempatkan korban sebagai subyek dengan mendasarkan penggunaan ilmu pengetahuan modern (vulkanologi) dan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Tantangannya adalah bagaimana memulai pengalihan ketrampilan penelitian dan perencanaan, sehingga diharapkan kurban dapat terlibat dalam proses kajian, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam manajemen penanggulangan bencana.

Untuk itu, metode partisipatif merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mendukung mekanisme internal. Asas yang melandasi mekanisme ini adalah “pemberdayaan”, yaitu memperhatikan kapasitas awal masyarakat dan kegiatan dibangun agar masyarakat dapat mengembangkan kapasitasnya sendiri (Paripurno dkk, 2006: 131).

Hasil riset lain tentang Merapi berbicara mengenai manusia dan alang-alang (Pranowo, dalam Dove dan Martopo, 1987: 133-166) dan manusia dan hutan: proses perubahan ekologi (Pranowo, 1985). Kajian ini didasarkan pada riset antropologis di dua desa lereng Merapi yang bernama “Kawastu” dan “Klangon”. Meskipun keduanya ditulis dalam format yang berbeda (artikel dalam buku *editing* dan buku), tetapi keduanya berasal dari riset yang sama. Riset ini menunjukkan bahwa rumput alang-alang menempati posisi dilematis, pada satu sisi dianggap sangat membantu petani yang tinggal di lereng gunung dalam memelihara ternak yang membutuhkan rumput alang-alang ini, tetapi pada sisi lain pemerintah menganggapnya merusak ekosistem sehingga perlu dibabat dan diganti dengan tanaman

pohon-pohon berkayu, selain menanam jenis rumput yang lain seperti rumput kolonjono, rumput gajah, dan lain-lain yang juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Hasil penelitian lain dilakukan di Kecamatan Kemalang, Klaten, oleh Heri Parmanto (2007). Tulisan ini berfokus tentang kompleksitas penambangan pasir yang ada di kecamatan ini yang dihasilkan oleh letusan Merapi di masa lalu. Parmanto (2007) menyampaikan temuan bahwa penambangan meluas dan berpindah dari Kali Woro ke lahan penduduk. Pembuatan akses jalan mendorong perkembangan penambangan di Kali Woro sejak pertengahan dasawarsa 1980-an. Masuknya para pemodal besar pada sekitar tahun 1993 mengubah cara penambangan dari manual ke penggunaan alat berat (*back hoe*) yang dilakukan secara ilegal dengan *backing* militer. Kecepatan alat berat menambang pasir dan batu membuat penambang tradisional terdesak dan penghasilan di antara mereka pun kian timpang. Penambang tradisional lalu menolak kehadiran alat berat ini dan memintanya untuk ditarik. Konflik pun terjadi di antara kedua pihak. Setelah cadangan pasir dan batu

semakin berkurang, maka pada sekitar tahun 2001 aktivitas penambangan beralih dan meluas bukan hanya di lahan-lahan penduduk tetapi bahkan di areal hutan lindung (dengan penambangan manual) yang berbatasan dengan tepian sungai. Aktivitas penambangan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku ini tidak lepas dari keterlibatan para aparat, oknum pejabat dan dinas-dinas tertentu yang membiarkan penambangan ilegal itu. Preman dan orang setempat yang berpengaruh pun turut menambah kompleksitas dunia pertambangan ini.

Ahimsa-Putra (2012) meneliti tentang pengelolaan *lavatour* di Dusun Pangukrejo, Ngrangkah dan Pelemsari, yang terkenal dengan sebutan Kinahrejo (kampung di mana *Mbah* Maridjan almarhum berdomisili). Ia menyoroti tentang aktivitas para pedagang, pengelola parkir, pedagang, fasilitas dan pengelolaan tujuan wisata ini secara umum. Ia merekomendasikan perlunya penataan dan pengelolaan lebih baik oleh para pemangku kepentingan di lokasi ini. Meskipun demikian, ia belum mempertautkan aktivitas ekonomi pariwisata itu dengan proses dan capaian rehabilitasi ekonomi oleh komunitas terdampak yang

terlibat, utamanya warga dusun-dusun di Desa Umbulharjo dan Kepuharjo yang memanfaatkan *lavatour* untuk penghidupan mereka.

2.2. Capaian Riset Sebelumnya

Prihandono (2005) meneliti tentang perebutan akses dan distribusi air yang berasal dari Umbul Wadon (di Sungai Kuning, Pelemsari, Desa Umbulharjo) oleh para pemangku kepentingan, terutama warga (yang berbasis agrikultural), bisnis (minuman kemasan) dan pemerintah daerah (PDAM). Ia menemukan bahwa hal itu mengarah pada relasi konflikktual untuk mendominasi akses terhadap air, oleh karena debit air tidak memungkinkan untuk didistribusikan secara adil kepada semua pihak. Kekurangan air juga memaksa warga berganti jenis tanaman, dari lahan tanah basah (sawah padi, misalnya) ke lahan kebun (misalnya, kebun salak) sebagai strategi penghidupan berkelanjutan yang terpaksa dipilih warga. Namun ketika akses sungguh mencemaskan, warga pun secara paksa menguasai sepihak mata air itu dengan mensegelnya bagi kepentingan lain, dan ingin mendominasinya sendiri. Ke

depan ini menunjukkan betapa pengelolaan lingkungan hidup menjadi krusial, terutama mengenai sumberdaya air yang sangat strategis dan tak tak tergantikan ini.

Pramono (2008-kini) memfokuskan diri pada kiprah Paguyuban Sabuk Gunung Merapi (Pasag Merapi) dalam merespon isu erupsi Merapi, taman nasional dan eksploitasi batu dan pasir. Ia menggunakan perspektif sosiologi politik, terutama pada ranah *community development and grassroots community*, dalam melakukan kajian. Secara demikian, ia tidak mengkaji komunitas terdampak secara keseluruhan, melainkan pada paguyuban dan kiprah para anggotanya. Itu pun berfokus pada isu tertentu, dan bukan mengenai rehabilitasi ekonomi.

Pramono (2010) lebih banyak mengkaji mengenai kesiapsiagaan bencana pada komunitas dusun-dusun teratas di Desa Sidorejo dan Tegalmulyo (Kemalang, Klaten). Mengikuti skema CRCS UGM yang mendanainya, ia melakukannya dengan perspektif ilmu, agama dan budaya. Ia menemukan bahwa komunitas telah memiliki mekanisme kesiapsiagaan sendiri, baik terumus oleh pengalaman maupun oleh

pendampingan kalangan kampus (PSMB UPN) dan LSM (Kappala Indonesia, YEU, CRI). Format kesiapsiagaan bencana itu berbeda dari pola yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Klaten (Satlak PB di bawah Kantor Kesbangpolinmas, yang kemudian berubah menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah/BPBD). Format substantif, praktis, dan cepat tanggap (responsif) versi masyarakat berbeda dari format pemerintah yang cenderung formalistik, prosedural, dan lambat bertindak. Perbedaan ini menimbulkan komplikasi relasi yang bernuansa negatif di beberapa lokasi barak penampungan, seperti di Kembang dan Dompol. Namun bila pelaku lapangan menyadari, dampak itu sebenarnya dapat diatasi, sebagaimana terjadi di Ngemplak Seneng (yang menampung pengungsi dari Desa Panggang dan Balerante).

Studi ini merekomendasikan adanya pola kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan bencana secara integratif dengan menggabungkan keunggulan kedua belah pihak. Dukungan sumberdaya dan akses pemerintah perlu dikombinasikan dengan format baku yang telah

dimatangkan oleh pengalaman menghadapi bencana yang dimiliki oleh komunitas terdampak. Meskipun secara formal koordinasi berada pada pemerintah daerah, namun praktik tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana kiranya dapat seluas mungkin mengakomodasi partisipasi komunitas. Secara demikian perspektif modern-formal dipadukan dengan kearifan dan pengetahuan lokal.

Pramono dan Birowo (editor, 2012) menyunting beberapa tulisan mengenai peran Radio Komunitas Lintas Merapi di Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, dalam merespon kebencanaan Merapi. Tulisan keduanya bertautan dengan aktivitas *on air* dan *off air* radio komunitas itu. Tulisan-tulisan dalam buku *editing* terbitan LPPM UAJY itu (2012) dilakukan bersamaan dengan program penyaluran air bersih yang dilakukan oleh warga setempat (yang dikoordinir oleh para aktivis radio), LPPM UAJY dan KARINA KAS. Namun demikian, tulisan itu juga belum mempertautkannya dengan proses rehabilitasi ekonomi pasca bencana erupsi 2010.

Pramono, bersama dengan Wisnubroto, dkk. (2012), meneliti pula di lereng Merapi, yaitu Desa Balerante dan Glagaharjo, mengenai warga penolak relokasi. Riset yang didanai oleh skema Riset Unggulan Perguruan Tinggi Dikti ini berfokus pada kajian sosio-yuridis tentang solusi dari sikap pro-kontra terhadap kebijakann relokasi oleh pemerintah. Temuan lapangan mereka menunjukkan pentingnya diskresi kebijakan agar komunitas pada Area Terpaan Langsung (ATL) tetap dapat difasilitasi layanan kebutuhan dasar mereka, karena ini berkaitan dengan HAM (Ekonomi, Sosial dan Budaya), namun tetap meminta warga untuk memiliki kesiapsiagaan bencana yang tinggi agar pemerintah tidak melanggar Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi warga dari ancaman bencana. Konsep *living in harmony* menjadi titik temu antara kepentingan warga dan pemerintah. Warga (terpaksa) dibiarkan menetap di daerah terlarang karena ancaman bencana namun mereka diminta untuk bersiaga penuh dalam menghadapi ancaman bencana dan mampu menjaga keselamatan dengan meninggalkan lokasi bila ancaman datang.

Namun pemerintah pun terpaksa tidak dapat memberikan bantuan optimal karena warga menempati area terlarang.

Mencermati semua kajian di atas, kami belum menemukan kajian mengenai rehabilitasi ekonomi komunitas terdampak pasca bencana dalam perspektif ilmu sosial dan politik. Oleh karena itu, riset ini hendak memberikan sumbangan kebaruan temuan untuk turut memperkembangkan khasanah ilmu pengetahuan. Selain itu, secara praktis, kajian ini juga berorientasi pada sumbangan langsung bagi pemerintah (dengan tawaran format rekayasa sosial bagi kebijakan publik) dan komunitas terdampak (dengan memberikan hasil refleksi dan evaluasi untuk membantu komunitas dalam memperkuat langkah ke depan dalam rehabilitasi ekonomi) pasca bencana.

2.3. Kerangka Teoritik

Kajian ini akan menggunakan teori modal sosial (dan aneka modal terkait) dan kewirausahaan dalam menganalisis data terkumpul, dan merumuskan temuan lapangan serta penulisan tulisan penelitian. Kedua

perspektif teoritik akan dipakai sesuai dengan relevansi data lapangan.

Bourdieu mengintroduksi konsep modal sosial (*social capital*) dalam tulisan berjudul *The Forms of Capital* (1986) dan 'Field of Power, Literary Field and *Habitus*' (Bourdieu, 1986, dalam Daring, 2007: 88-98). Dari perspektif sosiologis, ia mengidentifikasi dan mendeskripsikan beragam konsep modal, seperti modal kultural, ekonomik, fungsional, linguistik, personal, politik, profesional, sosial dan simbolik (1991: 230-251, dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000: 88). Namun jenis modal yang paling penting menurutnya adalah modal ekonomik, sosial dan kultural (Reed-Danahay, 2005: 64). Meskipun tidak dapat disubstitusikan timbal-balik, namun beragam modal ini dapat dikombinasikan untuk memperoleh bentuk modal yang baru (Bourdieu and Passeron, 1977, dalam Field, 2003: 14). Terinspirasi oleh Marx, ia memandang modal ekonomik sebagai 'akar' dari semua tipe modal tersebut (Bourdieu, 1986: 252, in Field, 2003: 15).

Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai "...the sum of resources, actual or virtual, that accrue to

an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition" (Bourdieu and Wacquant, 1992: 119 dikutip dari Field, 2003: 15; juga dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000). Komponen pertama modal sosial adalah sumberdaya yang terkait dengan keanggotaan kelompok dan jaringan sosial. Di dalam keanggotaan kelompok dan jaringan sosial ini berbagai modal dapat dikombinasikan untuk menciptakan modal yang lebih besar. Bourdieu menyebutnya "*the accumulation of social capital.*" Ia juga menyatakan bahwa solidaritas dalam jaringan itu muncul karena adanya keuntungan bagi para anggota, baik material maupun simbolik (Field, 2003: 17). Sedangkan komponen kedua didasarkan pada "*mutual cognition and recognition*" (Bourdieu, 1980; 1986; 1998a, dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000). Hal ini dapat terwujud bila praktek komunikasi dapat mempersuasi aktor atau stakeholder lain agar mengakui superioritas yang dimilikinya berdasarkan kepemilikan terhadap aneka kapital yang lebih besar.

Sedangkan modal kultural memiliki tiga bentuk keberadaan (Bourdieu, 1977; 1979; Bourdieu & Passeron, 1977, dalam Falk and Kilpatrick, 2000: 88). Pertama, eksistensi yang terkait dengan *habitus*, yang terbentuk melalui pendidikan. Kedua, modal kultural terealisasi di dalam aneka kenyataan kultural. Ketiga, keberadaannya terlembagakan di dalam lembaga kultural, misalnya lembaga pendidikan, melalui aneka sertifikasi, diploma dan ujian. Modal kultural ini dapat dipergunakan untuk meraih dan meningkatkan beragam modal yang lain.

Bila dikombinasikan dengan modal ekonomik dan sosial melalui *habitus*, modal kultural dapat menentukan tatanan dan kelas sosial. Melalui *habitus* yang menyediakan 'jembatan' antara subyektivitas pelaku dan posisi obyektif, subyektivitas pelaku dapat memobilisasi dan mengakumulasi aneka kapital untuk memperoleh posisi lebih tinggi di dalam tatanan dan kelas sosial. Karena pelaku lain pun melakukan hal sama maka terjadilah kompetisi antar-pelaku melalui *habitus* itu untuk meraih status lebih tinggi dan menjaga superioritasnya dari pelaku atau pihak lain struktur kelas

sosial. Modal kultural, dengan aneka simbol kulturalnya, dipakai untuk membedakan superioritas diri dari yang lain (Bourdieu, 1985, dalam Falk and Kilpatrick, 2000). Simbol kultural dapat dipakai sebagai pembeda (*as marks of distinction*) superioritas dirinya dari yang lain di dalam struktur sosial (Field, 2003: 13). Superioritas atas kepemilikan modal yang lebih besar hanya akan efektif hanya bila memperoleh pengakuan (sosial) dari yang lain yang memerlukan penggunaan aneka simbol kultural. Itulah sebabnya mengapa Bourdieu memberikan penekanan kuat tentang pentingnya kekuatan simbolik.

Dengan aneka pilihan subyektif dalam keterbatasan obyektif itu aneka bentuk modal dikendalikan dan dikelola oleh para pelaku (*agents*) untuk memenangkan kepentingannya (*winning the stakes*) di dalam perjuangan kekuasaan (*power struggle*). Relasi kuasa ini akan terjadi berkelanjutan di setiap ruang sosial yang akan menghasilkan pihak yang dominan dan didominasi (*the dominant and dominated*). Mobilisasi kapital, pilihan strategi (yang mempertautkan 'struktur subyektif' dan 'struktur obyektif'), dan *habitus*

dipakai untuk memenangkan perjuangan kekuasaan tersebut dalam meraih posisi diri dalam hierarki struktur sosial. Semua ruang sosial menjadi media kontestasi untuk berebut posisi superior yang diakui oleh yang lain secara berkelanjutan dan berulang. Interaksi beragam pihak di dalam dinamika proses rehabilitasi ekonomi pasca bencana erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, DIY, pada tahun 2010, kiranya sedikit banyak mengindikasikan adanya relasi kuasa dengan aneka kapital yang dimiliki dan berujung pada penempatan masing-masing pihak di dalam struktur sosial yang lebih luas.

Di manakah posisi individu atau subyek di dalam peta jejaring sosial? Di manakah individu berproses dalam kerangka modal sosial? Dalam kaitan inilah kajian modal sosial perlu menambah atau mempertajam dengan kajian "Neuro-Sosiologi." Mengapa neuro? Di sini kita menempatkan sistem neural sebagai pusat diskusi tentang alam emosi-manusia, dan sebaliknya bahwa dunia sosio-kultural manusia akan mempengaruhi sistem neural manusia. Dinamika dialektik inilah kiranya yang menjadi dasar bagi kajian-kajian neuro-sosiologi. Seperti

diuarikan oleh Massey, presiden Asosiasi Sosiologi Amerika (ASA), bahwa sejarah evolusi dan struktur kognisi telah mempengaruhi rasionalitas manusia. Secara demikian, sosiologi, mau tidak mau, pun mesti mempertimbangkan relasi dunia tingkah laku dengan dunia otak, sistem kerja neural.

Apakah kajian ini baru sekali? Tampaknya perlu juga kita menoleh ke sejarah perkembangan kajian Sosiologi. Kajian tentang kesadaran individual yang membentuk dunia sosial bisa dijejak sejak Max Weber menggagaskan tentang tipe ideal (*"ideal types"*). Tentang rasionalitas sebagai jembatan antara dunia gagasan dan problem materialitas, sebuah pusaran persoalan dalam dunia filsafati pasca Kant. Dalam tradisi interaksionisme simbolik, kita mengenal Goffman yang menggagaskan *"frame"* sebagai konfigurasi kesadaran dalam dunia keseharian. Bandingkan juga dengan Karl Marx, yang menggagaskan tentang basis material yang membangun dunia infrastruktur. Sehingga, tak ragu Campbell menyebut bahwa Marx adalah seorang *neuroscientist*.

Weber memahami bahwa etika Protestan, sebuah sistem idea, adalah sesuatu yang menyebabkan kapitalisme sebagai problem materialisme berkembang sampai hari ini. Sedang Goffman, memahami bahwa institusi sosial merupakan akar kausal dalam “frames” dimana struktur pikiran mendeterminasi institusi sosial (Lakoff 2013:10). Jika pemikiran Weber dan Goffman dibaca secara lebih mendalam, terletak metafor bahwa Weber dan Goffman berusaha menerjemahkan sistem neural dalam dunia sosial, atau memahami struktur sosial bermakna sebanding dengan memahami struktur neural. Inilah kiranya jembatan antara problem subjektif dan obyektif dalam pemikiran sosial, pengalaman obyektif mengalami *embodiment* dalam dunia subjektif, namun pada saat bersamaan struktur subjektif sebagai representasi dunia obyektif. Di sinilah emosi menjadi “ego-alien” yang menuntun tindakan imperatif dalam tugas-tugas sosial, menjadi yang semestinya dalam moralitas, perasaan respek atau kesadaran. Inilah kiranya argumen kenapa studi tentang otak menjadi bermakna dalam memahami tindakan sosial, atau secara khusus memahami emosi, kepercayaan, kerjasama dan respek

(Franks 2006:38). LeDoux (dalam Franks 2006:225) meringkasnya dalam bahasa bernas:

“Emotional arousal has powerful influences over cognitive processing. Attention, perception, memory, decision-making and the conscious concomitants of each are all swayed in emotional states. The reason for this is simple: emotional arousal organizes and coordinates brain activity”.

Karena emosi menjadi penting dalam logika resiprositas, maka dunia intersubjektif menjadi penting. Tak pelak, kita perlu menengok kembali gagasan Herbert Mead, filosof dan sosiolog Amerika awal, yang juga disebut oleh Habermas segenerasi dan sepenting dengan Weber dan Durkheim sebagai *founding father* Sosiologi, kiranya perlu pula disebut sebagai landasan memahami dunia sosial dan dunia nalar kerja otak.

Gambar 5: Komponen-komponen kerja otak

46

David D. Franks

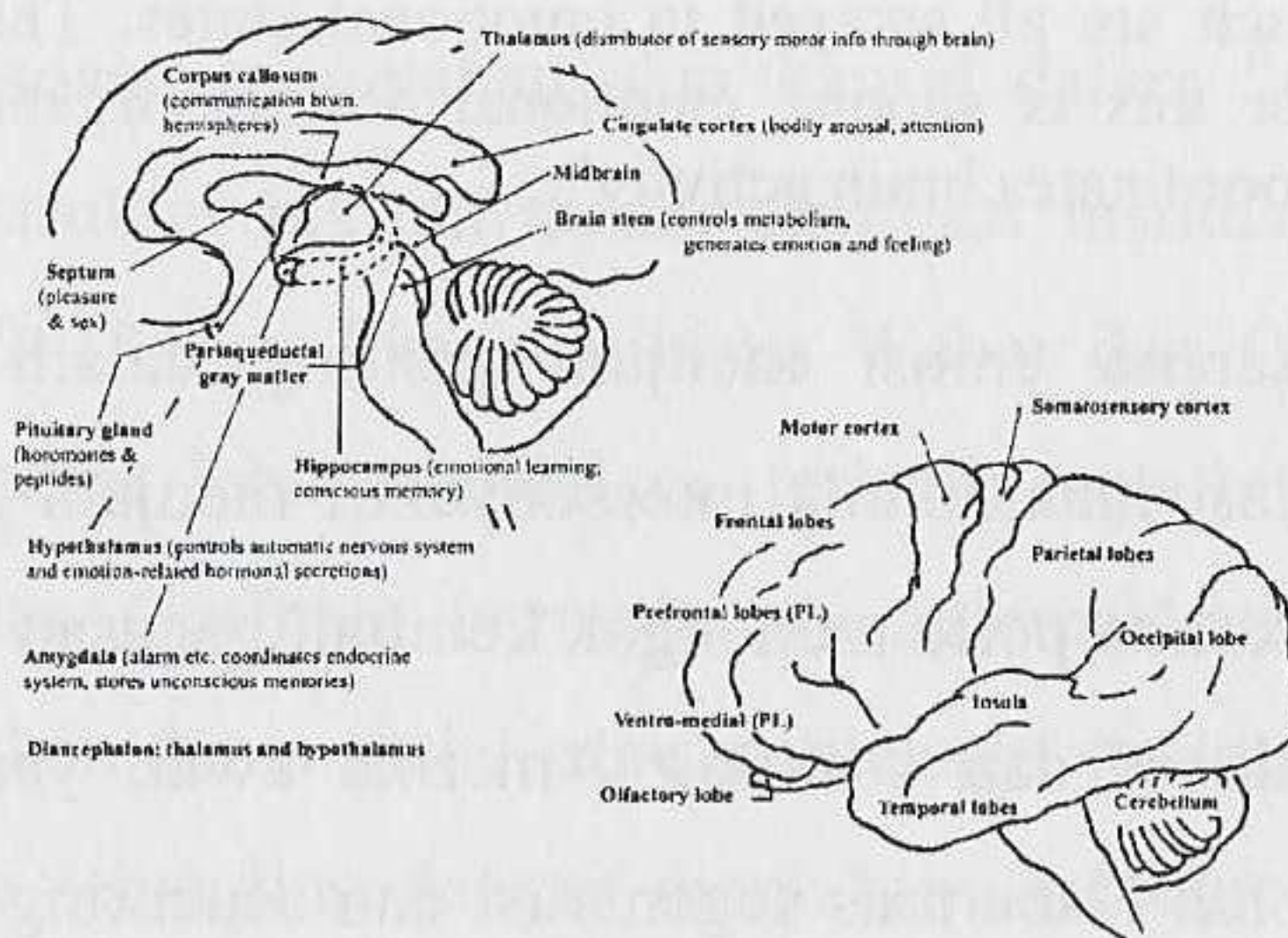


FIGURE 2.1. Emotion-Related Structures in the Brain

Sumber: Franks 2006:46.

Pendekatan Mead berbasis pada *the process of interaction in social contexts* dan *neurologi otak* memberikan kapasitas tingkah laku proses itu sendiri. Pandangan ini segendang sepermainan dengan kaum fenomenologi seperti Schutz (1932) atau Weber (1922), yang menekankan proses interaksi sebagai dinamika pikiran dan kesadaran. Bangunan konseptual Mead tentang “*role taking*” dalam interaksi sosial pun mesti

dipahami sebagai penerjemahan substrat-neurologik (Turner 2013:120).

“*Role-taking*”, sebagai konsep, akan memiliki makna melebihi asumsi “*the mind of another*”. Eksplorasi “*role-taking*” mengasumsikan konteks komunikasi seperti simbol, gestur, mimik yang mencipta situasi intersubjektif. Maka, memahami “yang lain” pun mensyaratkan predisposisi emosi dan kognisi. Aktor akan mengintegrasikan persepsi dan respon terhadap yang lain untuk menciptakan dunia sosial. Inilah konsep *self and other* dari Mead yang menarik untuk memberi dasar tentang emosi dalam relasi intersubjektif.

Kiranya, gagasan ini yang membuat Herbert Mead disebut salah satu tokoh *Theory of Mind*. Evolusi gagasan menunjukkan bahwa John Cacioppo and Gary Berntson, untuk mendeskripsikan dialektika alam sosial dan otak, lebih menggunakan terminologi “social neuroscience” (Cacioppo and Bernston 1992). Dua puluh tahun sesudahnya, Warren TenHouten, seorang sosiolog, menyebutnya sebagai “*neurosociology*”, dan kemudian David Franks (2006;2013) meletakkan pentingnya kajian neuro-sosiologi dalam tradisi kajian

sosiologi.

Bila kita kembali ke bahasan modal sosial, di manakah relasi antara neurosains dan modal sosial? Di dalam literatur modal sosial, tingkah laku kerjasama menduduki peran penting untuk membangun modal sosial. Namun, bagaimanakah kerjasama itu terjadi, apakah menyangkut kepentingan diri, kepercayaan, penghargaan? Sesungguhnya, problema kerjasama dalam level empiris seperti dituntut dalam kajian ilmu sosial mengalami kerumitan. Analisis yang sekarang cenderung diyakini, fakta empiris itu bersumber dari metode “pemahaman”. Di sinilah problem muncul berkait dengan kepastian empiris.

Maka, kajian kognisi neurosains bisa ditengok. Teknologi Positron Emission Tomography dan FMRI (*Functional Magnetic Resonance Imaging*) bisa memberikan tafsir studi fisiologi yang berkorelasi dengan aktivitas otak, seperti tindakan individual, solusi problem, pembuatan keputusan, dan seterusnya. Secara ringkas, metode ini memberikan pengukuran aktivitas otak dan fungsinya melalui teknologi. Inilah juga yang dibayangkan oleh Latour dan Wolgar (1986) ketika

menjelaskan teknologi pun bisa menjadi aktor dalam tindakan jejaring serta dunia laboratorium untuk konstruksi fakta.

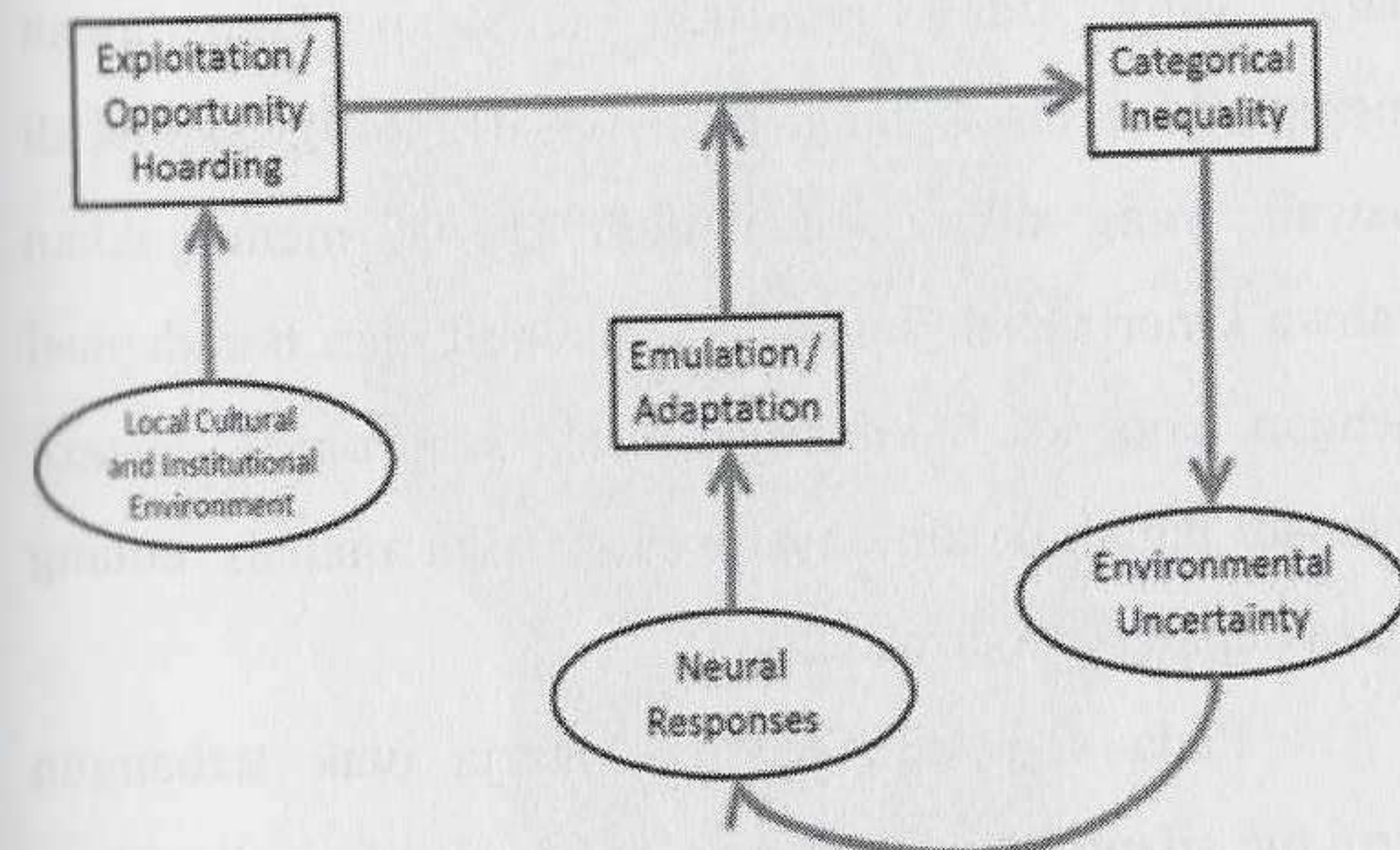
Modal sosial yang berbasis pada kepercayaan, pun menjangkarkan pada kinerja otak. Reyna (2002), seorang Anthropolog, mungkin memberi kejelasan tentang relasi antara kinerja otak dan dinamika dunia sosial. Konektor adalah konsep yang ditawarkan untuk menjadi jembatan antara internal kinerja otak, dunia subyektif dan eksternal dunia obyektif. Jembatan itu adalah pemahaman tentang jejaring struktur otak yang memiliki nalar kasualitas dengan dunia sosial yang memiliki nalar *knotting*, senantiasa terkonstruksi secara relasional dan multi.

“...Now we are in a position to offer an answer to the question, what is a connection? Connection is causation. It is the operation of connectors. Connectors knot reality into causal strings. Find the connectors in the universe and you explain the knotting of events through space and time. Find the connectors in that portion of the universe that is the social monism, and you explain the knotting of E-spaces into complex interconnected strands of string being. I believe a neurohermeneutic system is an important connector operating in the social monism.”(Reyna 2002:97).

Secara demikian, memahami koneksi antara

kinerja dunia otak dan dunia realitas adalah sebuah pemahaman, pembacaan terhadap teks juga. Teks yang senantiasa dikonstruksi oleh situasi yang terentang antara *mind*, *self* dan *society*, meminjam judul buku Herbert Mead. Inilah yang oleh Stephen Reyna (2002) disebut neuro-hermeneutik. Dalam tradisi Weberian, neurohermeneutik memiliki dua sisi: pertama, pemahaman interpretasi tentang apa yang terjadi dan tindakan manusia; serta kedua, pemahaman ini juga merupakan bagian dari penjelasan kausalitas. Di sinilah pemahaman hermeneutika problema merupakan konektor. Motif atau emosi merupakan bagian struktur fisik neuron yang menganyam kejadian-kejadian dalam dunia luar (*e-spaces-the causes*), dan yang memiliki konsekuensi dalam dunia luar juga (*the effects*). Memahami otak pun bermakna menafsir kinerja fungsi otak.

Gambar 6: Kinerja Otak dalam Konteks



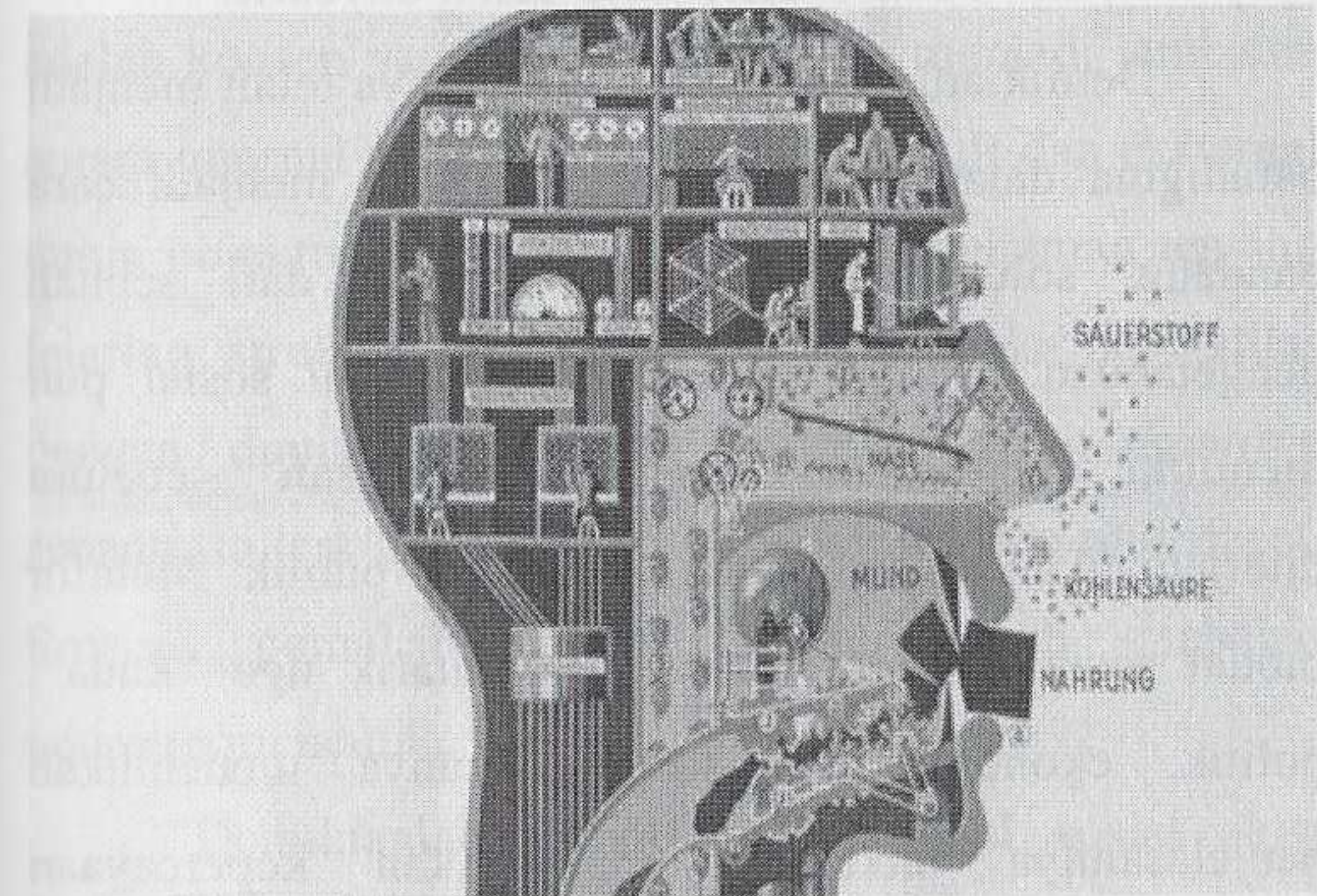
Sumber: Davis (2013: 340)

Pemahaman terhadap neurohermeneutik tersebut membawa kita pada soal, di manakah letak “jantung” persoalan lemahnya kepercayaan (*trust*) dalam masyarakat sehingga modal sosial menjadi tak berdaya juga? Di sinilah kita perlu melihat konteks dalam pusaran sejarah: politik-ekonomi. Sejarah politik ekonomi menjelaskan dengan *gamblang* bahwa Indonesia telah diringkus dalam logika kapitalisme, sejak era kolonialisme sampai neo-liberalisme.

Kapitalisme menciptakan ketimpangan struktural yang menggerus dimensi keadilan dalam konteks, sekaligus mengaitkan dan membentuk kinerja otak menjadi nalar-nalar yang tidak persisten terhadap kemampuan memprediksi masa depan (Davis 2013:340). Skema di bawah, yang dikonstruksi oleh Davis, menunjukkan bahwa kinerja otak senantiasa dibentuk dan beradaptasi dengan konteks. Akibatnya, otak, *prefrontal cortex*, menjadi lemah dalam daya prediksi atau analisis tentang masa depan (Lieberman 2003).

Pada sisi lain, tatkala kinerja otak terbangun struktur adaptifnya, kemudian terkoneksi ke wilayah *e-space* dengan berbagai tingkah laku yang pasif, tanpa motivasi, dan malah agresif (Olson 2013). Situasi ini, tentu saja membawa persoalan dalam membangun modal sosial.

Gambar 7: Struktur Kerja Otak



Sumber: Olson (2013)

Jikalau situasinya seperti ini, kita pun bisa melihat bahwa carut-marut Indonesia saat ini, tak hanya soal transformasi struktural, namun juga berantakannya transformasi mental. Membangun modal sosial, dengan demikian, tak bisa mengandalkan romantisme “kearifan lokal”, namun perlu strategi transformasi mental, menjadi bangsa yang sehat. Prasyarat itulah yang mesti kita pahami. Analisis sosiologis tentang modal sosial pun

akan mengalami penajaman, dengan memahami kerumitan dialektik antara kinerja otak, yang bersifat subyektif, dan dunia sosial, yaitu dunia obyektif.

Demikianlah, modal sosial kiranya telah menjadi paradigma dalam “kajian Sosiologi”. Ia menjadi cara pandang, solusi dan sekaligus praksis dari sebuah pengetahuan. Hanya, persoalannya, modal sosial pun memiliki kerumitan dan kekompleksan sebelum diterjemahkan dalam praksis kebijakan publik. Metafor modal sosial sebagai troika yang ditarik tiga “kuda”: politik, ekonomi dan sosial, kiranya menemukan penjelasannya tatkala memperhatikan kepercayaan sebagai penghubung.

Kepercayaan pun berada dalam rentang jejaring struktur dan individu. Memahami modal sosial di Indonesia, secara umum, atau dalam kasus ini di komunitas lereng Merapi, kita menjadi tahu bahwa dalam nalar logika resiprositas, keberadaan kepercayaan di dalam dunia intersubjektif kiranya menjadi penting. Gagasan lama dalam tradisi kajian Sosiologi Herbert Mead bisa membuka jalan untuk masuk dalam kajian Neuro-Sosiologi. Modal sosial yang berbasis pada

kepercayaan, pun menjangkarkan pada kinerja otak. Reyna (2002), memberi kejelasan tentang relasi antara kinerja otak dan dinamika dunia sosial, dimana konektor adalah konsep yang ditawarkan untuk menjadi jembatan antara internal kinerja otak, dunia subjektif dan eksternal dunia obyektif. Jembatan itu adalah pemahaman tentang jejaring struktur otak yang memiliki nalar kausalitas dengan dunia sosial yang memiliki nalar *knotting* senantiasa terkonstruksi secara relasional dan multifacet. Proses pemahaman itu, didefinisikan sebagai neurohermeneutik.

Demikianlah, kajian-kajian modal sosial akan mendapatkan ketajamannya tatkala mempertautkan atau mengkoneksikan kinerja dunia sistem neural dengan sistem sosial. Di sinilah pertautan “yang makro” dan “yang mikro” menjadi penting.

Pertautan itu, menjadikan kognisi sebagai modal sosial, menjadi instrumen bagi komunitas terdampak dalam membangun organisasi komunitas yang cukup solid untuk mendorong warga dalam rehabilitasi ekonomi, seperti Komunitas Pelemsari. Sedangkan bagi komunitas lain, seperti Komunitas Glagaharjo,

Kaliadem, Jambu, dan Petung, aneka modal yang dapat mereka akses mengindikasikan bahwa hal itu dipakai mereka dalam rahabilitasi ekonomi, baik berbasis individual keluarga maupun kolektif. Ini yang akan coba dikaji, sejauh mana modal sosial (dan aneka modal terkait) turut terlibat dalam proses rehabilitasi ekonomi warga.

Oleh karena warga tidak hanya menggunakan modal sosial itu dalam kepentingan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) semata, melainkan untuk pengembangan usaha pula, maka teori kewirausahaan menjadi relevan untuk dipakai sebagai “pisau analisis”.

Pada awal abad 20, kewirausahaan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Saat ini makna kewirausahaan telah berkembang, yaitu tidak hanya dipahami sebagai “pengusaha”, namun juga mengacu pada orang yang mampu mengelola diri dan lingkungannya sehingga akan dihasilkan ide, inovasi, penemuan baru, kreativitas, semangat baru dan pasar baru (Priyanto, 2009, 61). Kewirausahaan berada di dalam sanubari dan proses neural seseorang, kelompok,

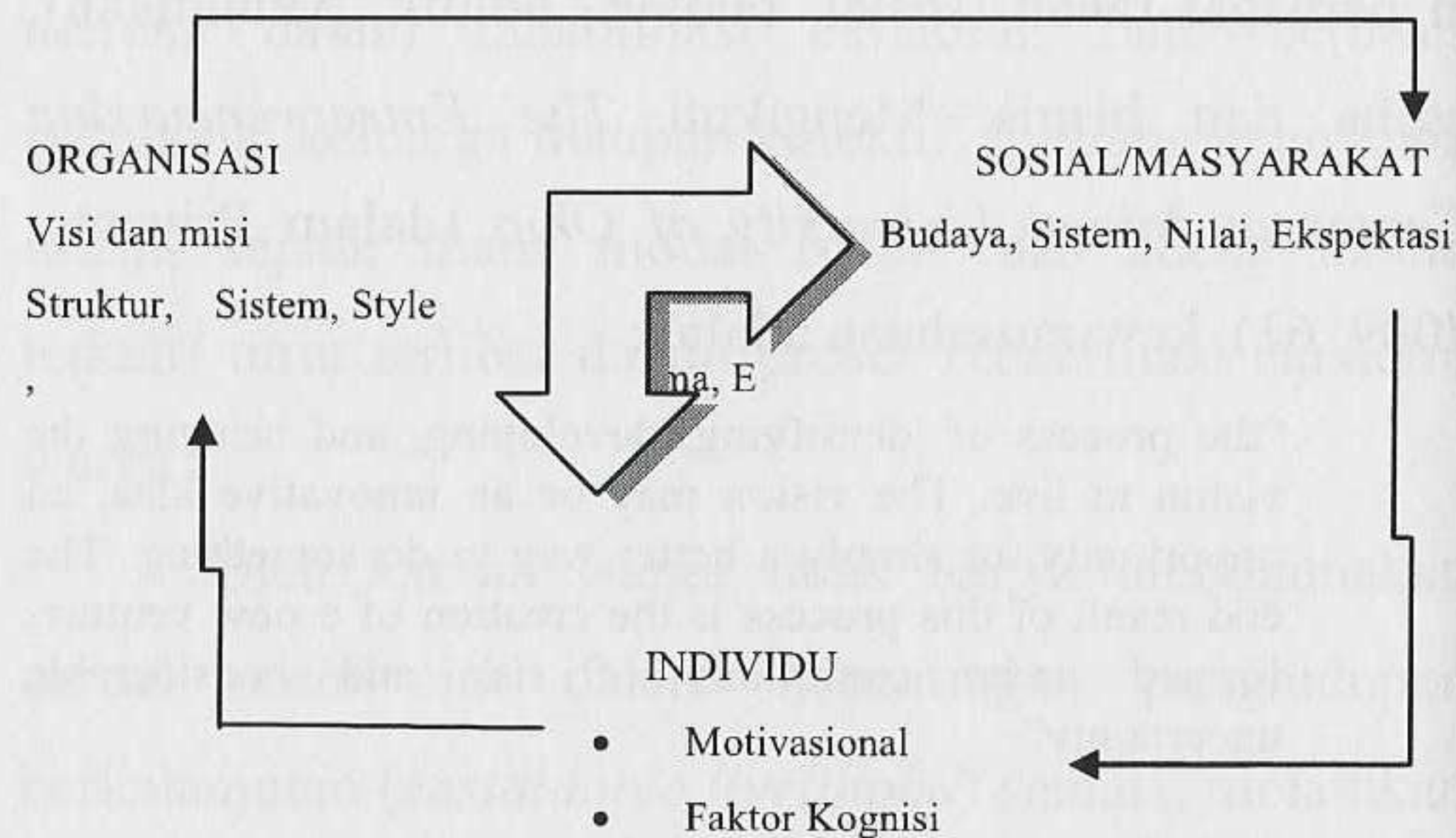
komunitas, masyarakat, organisasi dan entitas lain lebih besar yang karenanya akan menghasilkan aneka kegiatan di berbagai ranah (sosial, budaya, politik, pendidikan), usaha dan bisnis. Mengikuti *The Entrepreneurship Center at Miami University of Ohio* (dalam Priyanto, 2009, 61), kewirausahaan adalah:

“the process of identifying, developing, and bringing the vision to live. The vision may be an innovative idea, an opportunity, or simply a better way to do something. The end result of this process is the creation of a new venture, formed under conditions of risk and considerable uncertainty”.

Kini kewirausahaan merupakan bidang yang sangat luas karena mencakup *individual entrepreneurship*, *industrial entrepreneurship*, *eco-entrepreneurship* sampai *social entrepreneurship* sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Yunus dengan Grameen Banknya di Bangladesh.

Secara sosiologis, kewirausahaan dibentuk melalui proses sosial. Teori ini dapat disingkat dengan tampilan berikut ini:

Gambar 8: Siklus Konstruksi Sosial Kewirausahaan

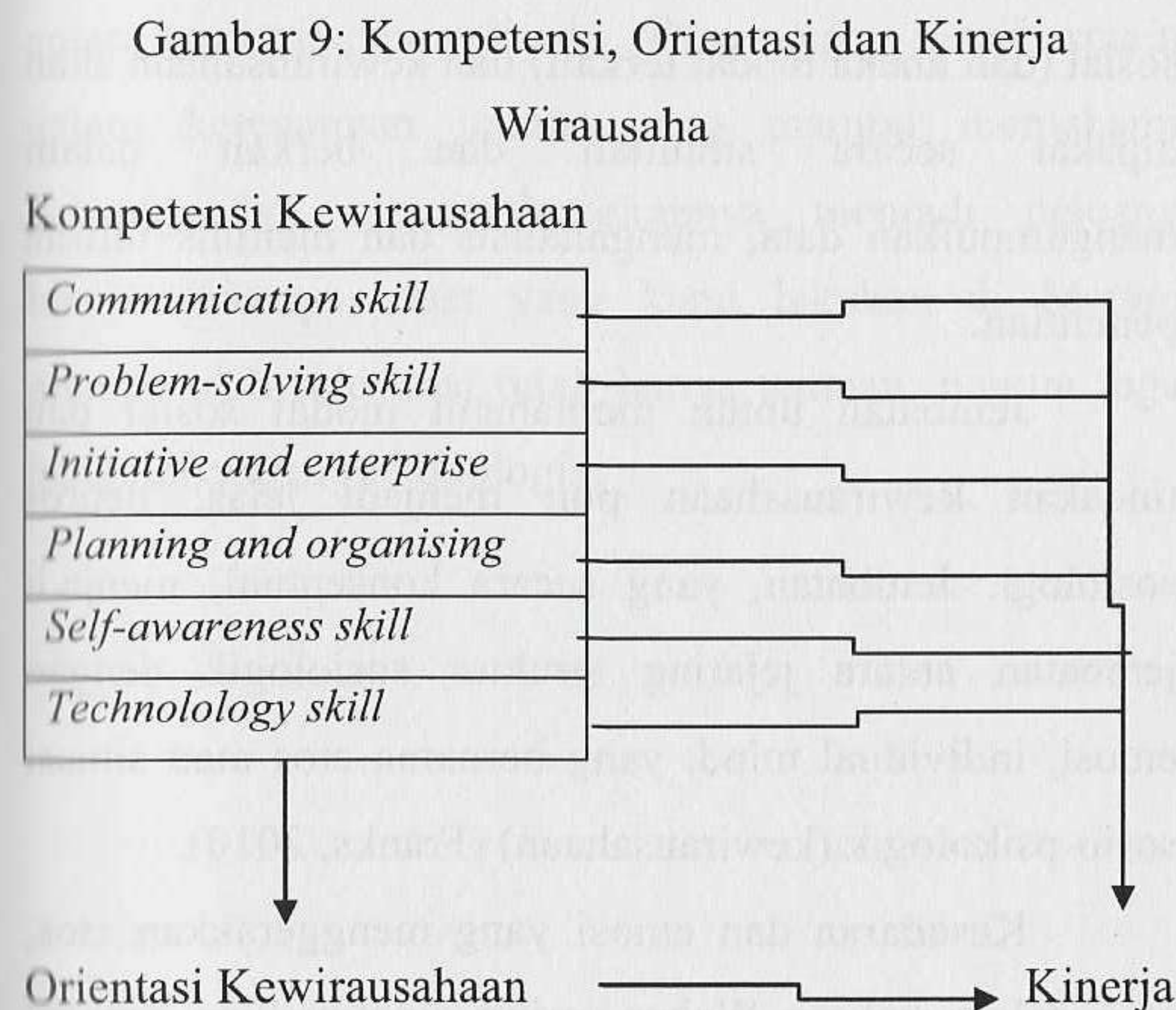


Sumber: Priyanto (2009: 64)

Pada gambar itu terlihat bagaimana kaitan antara individu dengan organisasi dan masyarakat. Sebagaimana perspektif Marxian, bahwa kesadaran subyektif dibentuk oleh kondisi obyektif maka kewirausahaan dikonstruksi oleh kondisi obyektif di masyarakat melalui aneka simbol, makna, pengetahuan, nilai, pekerjaan, peluang, relasi, kepercayaan, ekspektasi, dan internalisasi aneka kapasitas dan dukungan modal (*capitals*, Bourdieu). Ide kewirausahaan yang dapat dipahami sebagai bagian dari proses neural tidak terlepas

dari konteks di mana ia berasal. Sebagaimana Weber sampaikan, sosiologi kewirausahaan berbicara mengenai konteks, proses dan dampak dari aktivitas kewirausahaan itu. Konteks kewirausahaan berupa bentang geografis, kerapatan demografis, organisasi sosial, struktur budaya, sistem nilai, norma dan ekspektasi yang terpola secara sosial. Sementara itu, proses kewirausahaan yang dilakukan oleh pelaku akan melibatkan proses neural para dirinya ketika menanggapi peluang dan konteks, pemaknaan (*subjective meanings*), tindakan sosial dan perilaku kewirausahaan yang terbentuk, yang semua itu merupakan praktik sosial (*social practices*), meminjam pemikiran Anthony Giddens, yang merupakan hasil dari proses strukturasi antara struktur (*system*) sosial yang melingkupi dan agensi (*agency*) yang merupakan kebebasan diri subyek dalam memilih dan mengambil tindakan sosial. Interaksi itu semua berada di dalam konteks ruang dan waktu (*time and place*) yang bergerak dinamis, bukan statis. Maka kewirausahaan, secara sosiologis, menemukan kerumitan dan kompleksitasnya, sehingga detail yang terjadi pada pelaku di dalam konteks kehidupannya akan lebih dapat secara detail dipahami.

Proses di atas akan menghasilkan seorang wirausaha yang memiliki kompetensi kewirausahaan untuk mencapai kinerja tertentu. Formulasi Isa (2011, 159) tentang format sosok wirausaha pada Gambar 5 kiranya dapat dipahami sebagai cerminan visual dari dinamika kerja otak di dalam konteks sebagaimana Gambar 2. Keenam konsep di dalam Gambar 2 akan dijadikan acuan awal untuk mendeteksi sejauhmana proses internal individual kewirausahaan muncul di kalangan pelaku usaha pada komunitas terdampak bencana erupsi yang tinggal di sejumlah hunian tetap dan di sejumlah lokasi usaha. Salah satu lokasi usaha yang sedang tumbuh pesat adalah *lavatour* Pelemsari dan Pangukrejo. Oleh karena itu, keenam konsep itu dijadikan komponen dari daftar topik untuk mengumpulkan data, baik melalui observasi, wawancara, FGD maupun dokumentasi data sekunder *via* sejumlah sumber data. Keenam konsep pada Gambar 2 itu dikaitkan dengan keenam konsep pada Gambar 5 sebagaimana berikut:



Sumber: Isa (2011:162)

Kewirausahaan membutuhkan modal sosial (dan modal lain terkait) untuk berkembang. Demikian pula, orang yang memiliki dan mampu memanfaatkan modal sosial (dan modal terkait) akan dapat berkembang menjadi seorang wirausaha, meskipun tidak secara otomatis. Oleh karena itu, keduanya memiliki kaitan erat. Kaitan itulah yang akan coba ditelusuri di lapangan penelitian. Demikianlah maka konsep teoritik modal

sosial (dan aneka modal terkait) dan kewirausahaan akan dipakai secara simultan dan berkait dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menulis tulisan penelitian.

Jembatan untuk memahami modal sosial dan tindakan kewirausahaan pun menjadi jelas: neuro-sosiologi. Jembatan, yang secara konseptual, menjadi jembatan antara jejaring struktur sosiologik dengan emosi, individual mind, yang bernama etos atau situasi sosio-psikologik (kewirausahaan) (Franks, 2010).

Kesadaran dan emosi yang menggerakkan etos, atau dalam bahasa Weber sering didefinisikan sebagai nalar rasional instrumental adalah kunci tentang bagaimana individu sebagai aktor memahami persoalan, menangkap peluang, mengambil keputusan dan menangguk profit dari celah struktur tersebut. Inilah yang disebut sebagai jiwa kewirausahaan.

Di sinilah kita melihat bahwa kewirausahaan menampilkan etos/sosio-psikologik, yang tumbuh dalam situasi sosiologik atau berjangkar dalam struktur jejaring. Jadi perilaku kewirausahaan adalah tegangan terus menerus, dan sekaligus keterkaitan timbal-balik,

antara struktur dan individu. Hanya yang bisa bermain dalam ketegangan inilah, yang mampu memahami peluang dan mengembangkannya menjadi peluang bisnis. Kiranya, riset yang kami lakukan di Merapi memperoleh relevansi tidak hanya temuan, namun juga pengembangan metodologis.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Proses Pengumpulan dan Sumber Data

Prosedur pengumpulan data ini melingkupi sejumlah kecil subyek kajian melalui proses relatif intensif dan panjang untuk menyusun suatu pola dan keterkaitan makna (Dukes, 1984; Oiler, 1986). Melalui proses ini peneliti 'terbingkai' pengalamannya dalam rangka memahami para informan (Nieswiadomy, 1993).

Mempertimbangkan populasi yang menjadi subyek kajian relatif banyak maka studi ini mengutamakan para informan kunci² yang relevan (pengurus paguyuban, pelaku usaha (pedagang souvenir, jasa ojek dan trail, penjaga parkir, sopir jeep wisata, penjual makanan/minuman), tokoh komunitas, tokoh perempuan, pengelola lavatour, Ketua RT dan RW, Kepala Pedukuhan dan perangkat desa terkait sebagai sumber informasi melalui *interview* dan FGD.

² Informan kunci akan ditemukan antara lain dengan teknik *snow-balling*. Informasi para informan akan membantu peneliti menemukan siapa yang menjadi sumber pengetahuan dan informasi utama di antara para subyek kajian.

Selebihnya, observasi di lokasi dilakukan dalam pengumpulan data primer ini. Namun demikian data yang kami peroleh sebelumnya di lokasi ini (2011-2012) juga sangat membantu. Untuk memperoleh tambahan informasi dari pihak-pihak tertentu yang belum dikenal, tim dibantu oleh warga setempat yang sudah dikenal dalam riset sebelumnya sebagai tenaga lapangan pengumpul data dan persiapan penyelenggaraan FGD. Para relawan mahasiswa yang mau meluangkan waktu membantu riset ini pun dilibatkan: 5 orang. Selain itu, para pengambil mata-kuliah Metode Penelitian Kualitatif (21 mahasiswa) dan Sosiologi Bencana (12 orang) juga dilibatkan, sehingga antara penelitian dan pengajaran/pendidikan memiliki kaitan langsung. Sumber data lain diperoleh dari kliping berita media massa lokal, dokumen internal warga, Pemerintah Kabupaten Sleman (terutama BPS, BPBD dan Dinas terkait), di samping aneka referensi dan hasil riset yang diperoleh melalui internet. Sejumlah buku telah kami kumpulkan melalui pembelian di toko buku dan cetak *e-book* yang berhasil kami *download*.

Sampai dengan tulisan akhir ini disusun, kami telah melakukan observasi, wawancara, wawancara mendalam, pengumpulan data sekunder (melalui internet dan buku literatur terkait), dokumentasi foto, serta diskusi peneliti dan relawan pengumpul data untuk menafsirkan, mendalami dan menganalisis. Diskusi terfokus dengan kontak person setempat telah kami lakukan di Huntap Karangendal. Kami juga mengetahui empat aktor utama dalam perekayasa sosial Komunitas Kinahrejo untuk melakukan rehabilitasi ekonomi. Peta jaringan dan relasi di antara mereka, dan mereka dengan jaringan luar komunitas, juga sudah mereka informasikan. Wawancara mendalam dengan Pak Mitro, Mas Kote dan Mas Remon, selain Pak Badiman, sungguh menggambarkan apa yang mereka alami. Wawancara para relawan mahasiswa dengan Pak Suyan, Mas Sigit, Mas Koplak dan Bu Purwanti juga menunjang informasi yang peneliti temukan. Pembicaraan dengan Bu Sumijo dan para sopir truk pengangkut pasir Merapi, juga penjual jasa sewa motor, menunjukkan bagaimana warga bangkit dan merehabilitasi ekonomi dengan aneka usaha.

Sejumlah observasi yang dikombinasikan dengan pemotretan lapangan turut membantu kami dalam mereka-ulang kisah korban terdampak untuk “timbul kembali” ke “atas permukaan”. Aneka inovasi, kreasi, kerja keras, kerjasama, teknologi, komunikasi, spirit, dan kohesi sosial tampak dalam aneka upaya yang berhasil kami dokumentasikan selama observasi awal. Agar tidak mengganggu otentisitas dan naturalitas subyek yang dikaji, kami melakukan observasi “dalam senyap”, tanpa mengatakan bahwa kami peneliti. Namun sebagaimana etika penelitian, bila mana informan menanyakan, atau kami berkunjung ke rumah informan, seperti kunjungan ke Huntap Karangendal, kami menyampaikan secara terbuka maksud kedatangan kami, bahwa kami bermaksud mendokumentasikan proses rehabilitasi ekonomi para warga terdampak.

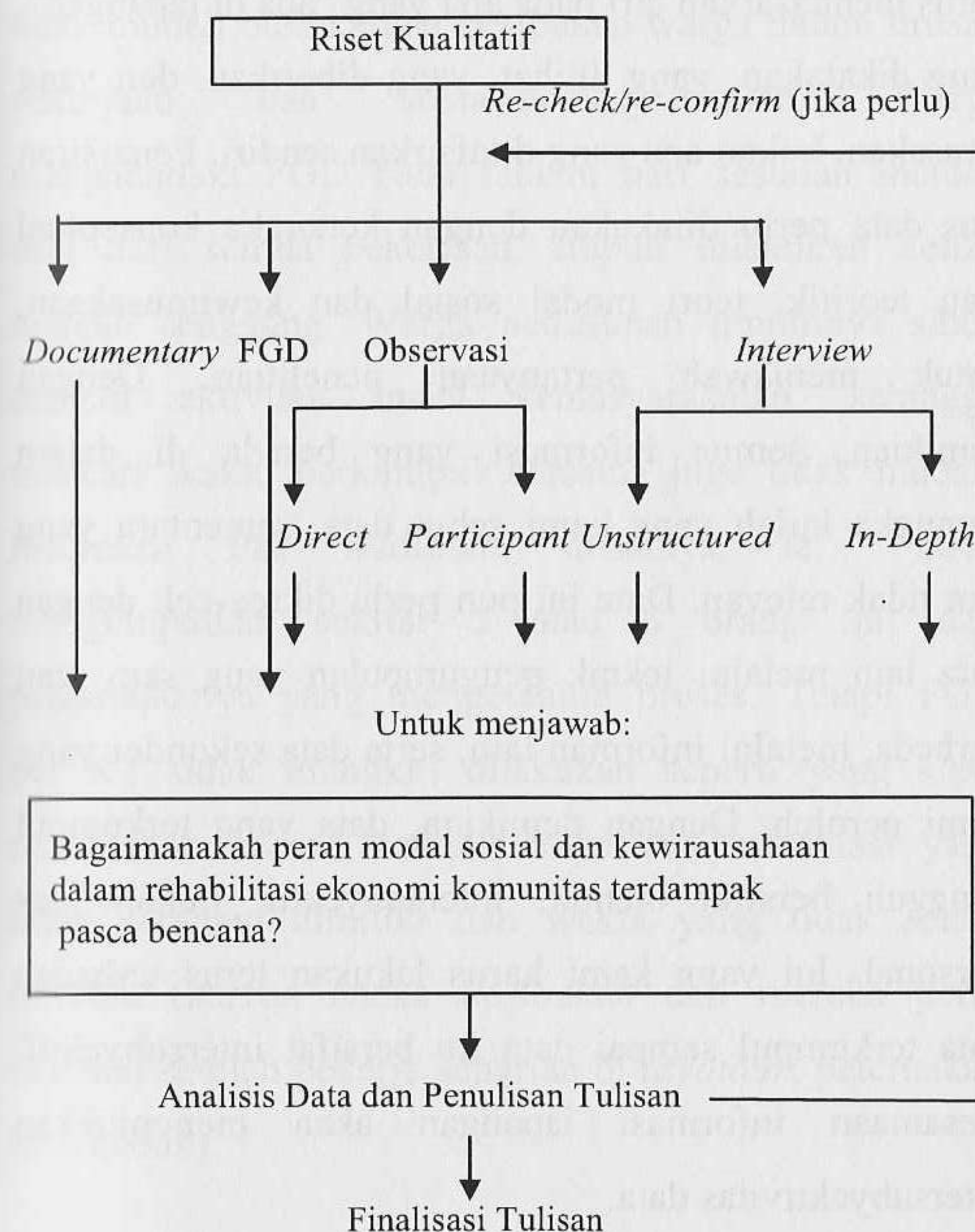
Dalam melakukan riset lapangan, prinsip etik tertentu akan dijadikan pegangan. Mengikuti O'Reilly (2005: 82), sejumlah prinsip ini adalah:

“...open and honest about the research, gain fully consent from participants, disclose what the researcher studies and produces, respect confidentiality and avoid exploitation raises dilemmas

for every ethnographer, beside attempt to balance competing rights and responsibilities for different groups and individuals, including the researcher him/herself.”

Proses pengumpulan data dalam keseluruhan proses penelitian dilakukan sebagaimana diagram berikut ini.

Gambar 10. Proses Pengumpulan Data dalam Bagan Alir Penelitian



Sumber: Modifikasi dari Nugroho (2007)

Dalam diskusi pendalaman data, kami menandakan pentingnya otentisitas data. Kami

sampaikan bahwa informasi berbeda dari data. Informasi berbeda dari penafsiran peneliti atau relawan. Kami harus mendasarkan diri pada apa yang “ada di lapangan”, yang dikatakan, yang dilihat, yang diberikan, dan yang dirasakan, bukan apa yang ditafsirkan sendiri. Penafsiran atas data perlu dilakukan dengan kerangka konseptual atau teoritik, teori modal sosial dan kewirausahaan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, semua informasi yang berada di dalam kerangka inilah yang kami sebut data, sementara yang lain tidak relevan. Data ini pun perlu dikros-cek dengan data lain melalui teknik pengumpulan yang sam atau berbeda, melalui informan lain, serta data sekunder yang kami peroleh. Dengan demikian, data yang terkumpul sungguh bersifat otentik, intersubyektif, bukan bias personal. Ini yang kami harus lakukan terus terhadap data terkumpul sampai data itu bersifat intersubyektif. Kesamaan informasi lapangan akan menunjukkan intersubyektivitas data.

FGD yang kami rancang membantu tercapainya intersubyektivitas data itu. Dari data itulah kami akan membuat penafsiran akademik untuk menjawab

pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi atas dasar temuan dan hasil penelitian ini. Persiapan FGD tidak mudah oleh karena kesibukan warga dalam urusan pekerjaan dan sosial-kemasyarakatan. Warga menghendaki FGD pada malam hari sesudah mereka usai dari semua pekerjaan. Itupun dilakukan ketika mereka senggang. Warga pedusunan umumnya sibuk dengan aktivitas sosial kemasyarakatan, sehingga mencari waktu berkumpul bersama juga tidak mudah. Informasi Pak Badiman, misalnya, ia bisa mengumpulkan sekitar 5 atau 6 orang inti dari pedusunannya yang mengetahui proses. Tetapi FGD per RT tidak mungkin dilakukan seperti yang kami rencanakan karena kendala kapasitas, informasi yang tidak seragam dimiliki dan waktu yang tidak selalu tersedia (karena aneka kesibukan dan mereka perlu istirahat setelah bekerja seharian di *lavatour*, peternakan atau kebun).

3.2. Catatan Lapangan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dicatat di dalam catatan lapangan. Wawancara yang kami rekam telah kami

selesaikan transkripnya dengan bantuan 4 relawan mahasiswa. Kombinasi catatan lapangan dan transkrip akan menjadi pondasi dalam memahami data lapangan. Para mahasiswa pengambil mata-kuliah terkait yang turun ke lapangan juga membantu membuat catatan lapangan, mengambil foto, merekam dan menceritakan apa yang mereka ketahui dalam diskusi yang diselenggarakan.

Data yang dianalisis tertuang di dalam aneka catatan lapangan (*fieldnotes*) dan format dokumentasi yang lain yang kami buat. Menurut Emerson et al (1995: 13), *fieldnotes* menyediakan “*the primary means for deeper appreciation of how field researchers come to grasp and interpret the actions and concerns of others.*” Semua proses pendokumentasian realita lapangan (misalnya dengan *writing jottings, memos, mappings, detailed notes*) akan dilakukan secara refleksif atau dalam istilah Pader: “*an ethnographic sensibility*” (2006, dikutip dari Yanow, 2006: 1). Aneka cara pendokumentasian data (foto, alat perekam dan metode

visual lain)³ kiranya melengkapi detail peristiwa lapangan yang tidak tertuang di dalam catatan lapangan yang dibuat karena aneka keterbatasan. Secara demikian, catatan lapangan mendukung metode pengumpulan data lain dan sekaligus membantu studi tetap di bawah metode etnografi refleksif (*the reflexive ethnography method*). Refleksi inilah yang masih belum maksimal kami lakukan. Ini memerlukan pemahaman mendalam akan kerangka teori, lapangan dan konteks yang selalu berkembang. Inilah yang akan kami tingkatkan sesudah tulisan akhir ini kami susun ketika kami menyiapkan tulisan lain berbasis data ini.

Secara keseluruhan, meskipun sulit, analisis kualitatif ini diupayakan mengikuti gagasan Ritchie and Lewis (2005: 212). Data mentah yang diperoleh coba dianalisis dengan menggunakan tahap-tahap di dalamnya. Meskipun terlihat bersifat linear, namun sebenarnya proses antar tahap ini bersifat siklis, fleksibel dan ‘*iterative-inductive*’. O’Reilly merumuskannya sebagai berikut: “*...repeating the phases of writing*

³ Literatur mengenai metode visual dapat dibaca pada karya Davies (2008: 129-150/chapter 6).

down, analysis and writing up are distinct phases of the research process that are inextricably interlinked” (2005: 177).

Untuk mempresentasikan realita lapangan ke dalam tulisan, peneliti memerlukan proses interaksi yang rinci dengan subyek penelitian, yang oleh Geertz (1973: 20-23) disebut ‘*microscopic*’. Bertautan dengan kedetilan di lapangan, terdapat dua hal penting yang perlu dipertimbangkan (Emerson et al, 1995: 14). Pertama, detil interaksional akan membantu peneliti menjadi sensitif dalam melacak dan menganalisis keterkaitan antara metode dan substansi. Kedua, dengan selalu berorientasi pada detil dalam interaksi, peneliti akan dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan mengikuti proses pada setiap peristiwa yang disaksikan dan sekaligus membantunya dalam mengembangkan dan menjaga kesinambungan interpretasi prosesual terhadap beragam kejadian di lapangan. Interaksi rapat dan detil dengan subyek di lapangan masih perlu kami tingkatkan oleh karena kian banyaknya pelaku usaha di lokasi. Ini berbeda dari ketika masa sebelum ada *lavatour* di Pangukrejo dan Pelemsari. Banyak orang dari beragam

dusun berdatangan untuk memperoleh nafkah dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki ekonomi mereka pasca erupsi. Banyaknya pelaku memberi kami tantangan baru untuk memiliki interaksi rapat dan detil sebagaimana Geertz sampaikan. Untuk itu, peran menemukan informan kunci adalah sangat penting. Melalui informan kunci yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam di lokasi akan membantu kami menemukan pola jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Sudut pandang informan kunci inilah yang membantu kami dalam memahami temuan secara mikroskopik.

Riset lapangan ini menggunakan logika induktif, yang berarti data lapangan akan diacu bila ada perbedaan antara teori konseptual dan data lapangan. Hal ini senada dengan perpektif Geertz (1983: 6, dalam Yanow, 2006: 15), yang memandang adanya ‘pergeseran’ (*a shift turn*) dalam proses akademik dalam ilmu sosial “*from trying to explain social phenomena by weaving them into grand textures of cause and effect to trying to explain them by placing them in local frames of awareness...*” Secara demikian pengutamaan data lapangan juga merupakan penghormatan terhadap ‘kerangka kesadaran lokal’

(*local frames of awareness*) komunitas terdampak di sejumlah hunian tetap di lokasi riset.

3.3. Penulisan

Hasil analisis pada awalnya dituangkan ke dalam tulisan per bagian per tema atau konsep yang dikenal dengan istilah '*thematic narrative*' (Emerson et al, 1995: 170-174). Presentasi lapangan ke dalam teks dapat berupa narasi atau gambar yang dianalisis dengan mempergunakan teori, literatur dan hasil studi yang relevan.

Dalam menulis tulisan secara menyeluruh, saya mengikuti beberapa hal yang ditekankan oleh O'Reilly (2005: 206-207) sebagai berikut.

"First, it starts by writing up the things the researcher is sure about. Second, a title (even just a working one) helps the writing move along; researcher has decided what s/he is writing about. Third, decide, where possible and at each stage, when researcher is describing and when s/he is explaining. Fourth, researcher does not try to organise before s/he knows what s/he wants to say. Fifth, since written work is for someone, researcher does not present everything s/he has found, otherwise, s/he has to have a reason to write. Sixth, researcher should be enjoying his/her process of writing."

Mengikuti perspektif fenomenologis (*actor oriented*), maka kajian ini menggunakan 'kaca mata' komunitas terdampak dalam memahami dan melakukan respons terhadap proses rehabilitasi ekonomi.⁴

⁴ Perspektif fenomenologis ini mengacu pada penjelasan Heddy Shri-Ahimsa Putra dalam lokakarya oleh CRCS UGM pada 21 Januari 2009.

BAB 4

MODAL SOSIAL, KEWIRAUSAHAAN DAN REHABILITASI EKONOMI

Target temuan kami adalah untuk (1) mengetahui apakah modal sosial dan kewirausahaan berperan dalam proses rehabilitasi ekonomi komunitas terdampak pasca bencana erupsi; (2) menyusun format rekayasa sosial berbasis proses rehabilitasi ekonomi tersebut sebagai masukan kebijakan publik; dan (3) memberikan *lessons learnt* serta *best practices* kepada komunitas tempatan di beberapa hunian tetap mengenai perbaikan proses rehabilitasi ekonomi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Oleh karena itu, hasil yang kami capai juga mengacu pada target temuan itu.

4.1. Peran Modal Sosial terhadap Rehabilitasi Ekonomi

Sebagaimana dikatakan oleh Bourdieu, modal sosial (*social capital*) ini menyangkut beberapa konsep, antara lain: sumberdaya, anggota kelompok (atau komunitas), relasi, jaringan, keuntungan, kognisi atau

gagasan atau pemikiran (*cognition*), pengakuan (*recognition*). Dalam literatur atau tulisan lain, modal sosial dikaitkan dengan konsep, misalnya: gotong-royong, kohesi sosial, ikatan sosial, tolong-menolong, kedekatan relasi, kepercayaan (*trust*), nilai-nilai bersama (*shared values*), pranata dan lembaga sosial, serta pengelompokan sosial (*social grouping, community*).

Kata Bourdieu, sebagaimana telah disampaikan pada tinjauan pustaka, komponen pertama modal sosial adalah sumberdaya yang terkait dengan keanggotaan kelompok dan jaringan sosial. Di dalam keanggotaan kelompok dan jaringan sosial ini berbagai modal dapat dikombinasikan untuk menciptakan modal yang lebih besar. Bourdieu menyebutnya "*the accumulation of social capital*." Ia juga menyatakan bahwa solidaritas dalam jaringan itu muncul karena adanya keuntungan bagi para anggota, baik material maupun simbolik (Field, 2003: 17). Sedangkan komponen kedua didasarkan pada "*mutual cognition and recognition*" (Bourdieu, 1980; 1986; 1998a, dikutip dari Falk and Kilpatrick, 2000). Bagaimana dengan realita di lapangan?

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesamaan. Cerita sejumlah informan kunci mengungkapkan bahwa warga terdampak memiliki modal sosial ini yang dapat ditunjukkan melalui beberapa fenomena sosial.

Pertama, **kohesi atau ikatan sosial**. Sejak dari pengungsian pertama sampai kedua warga selalu bersama atas dasar ikatan komunitas mereka: Pelemsari (yang lebih populer disebut Kinahrejo).⁵ Setelah meninggalkan barak pengungsian di Balai Desa Umbulharjo, yang mereka tinggali ketika tahap Siaga dan Awas, karena erupsi yang besar pasca letusan besar pertama pada 26 Oktober 2010, mereka pindah ke barak pengungsian yang lebih aman atas instruksi Pemerintah Kabupaten Sleman (yang memperoleh rekomendasi dari Badan Pengkajian dan Penyelidikan Teknologi Kegunungapian/BPPTK) yaitu di selatan Desa Tanjung. Mereka diberi pinjaman satu rumah untuk menetap

⁵ Sebutan Kinahrejo lebih dikenal umum oleh karena itu adalah nama kampung di mana Mbah Maridjan (alm.) berdomisili. Kampung Kinahrejo sebenarnya hanyalah satu dari beberapa kampung lain yang berada di dalam Pedukuhan Pelemsari.

sementara. Ketika letusan terbesar pada dini hari 5 Nopember 2010 terjadi, mereka sempat tercerai berai. Informan kunci kami dan keluarga, yang diikuti oleh beberapa keluarga lain, sempat mengungsi di selatan Umbulharjo (Jalan Pramuka), Yogyakarta. Lebih dari seminggu mereka tinggal di sana. Keluarga lain juga mengungsi ke lokasi aman yang berhasil mereka temukan. Untuk menjaga keamanan warga, pemerintah mengambil kebijakan bahwa warga yang berada di dalam radius 20 kilometer dari puncak Merapi harus mengungsi. Keinginan untuk selamat dan dalam situasi krisis semacam itu, membuat mereka mengungsi tanpa koordinasi di tengah malam. Mereka menjadi komunitas yang terdiaspora tanpa mengetahui di mana tetangga dan keluarga di pedukuhan yang sama.

Setelah keadaan terkendali, mereka mulai mencari dan menemukan tetangga dan keluarga lain. Informan kami menyampaikan bahwa sebagian besar warga mengungsi di rumah Pak Agus di utara Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sleman. Maka mereka pun berembuk, lalu bersepakat untuk bergabung dengan komunitas mereka di Sleman itu.

Mereka bekerjasama mencari bantuan angkutan, di samping naik sepeda motor mereka, untuk pindah dari Umbulharjo (Kota Yogyakarta) ke arah timur laut, yaitu Sleman. Ikatan komunitas pedukuhan membawa mereka mencari, menemukan dan bergabung bersama.

Mereka tinggal sampai dengan Desember dan Januari 2011 di Sleman. Setelah itu mereka bergotongroyong membangun hunian sementara di barat daya Merapi Golf di Desa Umbulharjo, di sebuah lapangan luas. Kohesi sosial, kerjasama, gotong-royong dan kebersamaan membawa mereka menyelesaikan Hunian Sementara (Huntara) yang dibantu oleh lembaga donor itu. Mereka bekerjasama secara sukarela dengan para tenaga bayaran yang ditanggung oleh sebuah lembaga bantuan kemanusiaan. Singkat kata mereka akhirnya menjadi komunitas pertama yang memiliki Hunian Sementara (huntara) bukan oleh dana pemerintah, melainkan bantuan swasta.

Kedua, **solidaritas**. Apa yang diilustrasikan di atas menunjukkan bahwa kohesi sosial menghasilkan solidaritas untuk selalu bersama dalam duka dan

bersama dalam mempersiapkan hari depan, termasuk pembangunan huntara.

Ketiga, **gotong-royong, tolong-menolong**. Solidaritas itu menghasilkan gotong-royong dan tolong-menolong sebagaimana mereka bahu-membahu hidup saling membantu di beberapa lokasi pengungsian dan pembangunan huntara.

Keempat, **sistem nilai bersama**. Apa yang menyatukan mereka secara sosiologis sebenarnya didasarkan pada sistem nilai yang sama. Sistem nilai ini dibentuk oleh kebersamaan hidup bertetangga yang mereka alami antargenerasi di Pedukuhan Pelemsari. Sistem nilai ini terbentuk oleh karena inter-relasi mereka dalam hidup sehari-hari. Kehidupan keseharian ini mencakup hidup dalam mengerjakan mata-pencarian sebagai pekebun dan peternak (yang paling utama) yang acapkali membutuhkan tetangga dalam membantu mengerjakannya. Sehingga interaksi itu yang dirajut setiap hari telah melahirkan kesaling-percayaan (*mutual trust*), kesamaan gagasan (*mutual cognition*), pengakuan akan eksistensi yang lain (*mutual recognition*), yang kemudian melalui proses sosio-kultural dipilin menjadi

aneka kebiasaan (*customs*), adat dan norma (*norms*) dan budaya lokal (*local culture*). Kesemua itu dirajut secara terus-menerus melalui aneka pertemuan (35 hari sekali/*selapanan*), kerjasama ritual (*sadranan*, *labuhan*, *syawalan*, *kendurenan*), dan siklus hidup manusia (lahir/*tingkeban*, *selapanan bayi*; akil-balik/*sunatan*, *tetakan* atau *tetasan*; pernikahan/*mantenan*; tua; kematian/ 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun 1000 hari/*nyewu*); dan gotong-royong kampung. Itulah mengapa mereka memiliki sistem nilai bersama yang kuat (*a strong shared values*), yang mempersatukan warga, bahkan mereka sudah bercerai-berai pun masih bisa menyatu untuk tinggal bersama di Sleman, lalu ke huntara, dan akhirnya ke Hunian Tetap (Huntap) Karangkendal yang berhasil mereka bayar sendiri dengan uang tabungan bersama yang dikumpulkan dari bantuan aneka donatur.

Kelima, **saling-percaya** (*mutual trust*). Ilustrasi pada cerita di atas dan paparan pada poin keempat itu menunjukkan bahwa mereka memilikin rasa saling-percaya yang tumbuh melalui aneka relasi, pengalaman dan kerjasama. Tentu saja tak semua ketetangaan

melahirkan kesaling-percaya, oleh karena aneka karakter, nilai-nilai pribadi dan kepentingan, tetapi sesaca sosial hal-hal yang interpersonal ini kiranya berhasil diatasi untuk menjaga kohesifitas komunitas karena adanya saling-percaya yang melebihi kecurigaan dan kekecewaan dalam pengalaman berelasi. Informan di Huntap Karangkendal menceritakan bahwa hanya mereka berempat yang menjadi inti penggerak pembangunan huntap, sementara yang lain bekerja untuk penghidupan masing-masing. Mereka berempat bekerja sukarela; tanpa upah. Namun karena keyakinan bahwa mereka perlu membantu sesama orang Kinahrejo, karena ikatan yang dimiliki, dan adanya saling percaya di antara mereka berempat, dan sejumlah orang lain, maka mereka secara altruistik terus memandu pembangunan huntap itu dengan kesungguhan. Saling percaya ini kiranya tak selalu melingkupi seluruh anggota komunitas, tetapi ia terjalin pula dengan elemen-elemen modal sosial yang lain: ikatan sosial (sebagai orang Kinahrejo), tolong-menolong, gotong-royong, solidaritas, dan percaya dan mempraktekkan nilai-nilai kebaikan, meskipun mereka mengalami kekecewaan.

Keenam, **relasi dan jaringan** (*sosial relation and network*). Komunitas Kinahrejo ini memiliki aneka relasi dan jaringan internal. Relasi ini melingkupi relasi karena ketetanggaan, sesama petani dalam satu kelompok tani, sesama peternak dalam kelompok peternak, kekerabatan atau trah, hubungan pernikahan, penjual dan pelanggan, dan sebagainya, sehingga mereka menjadi rajutan jaringan internal. Relasi dan jaringan yang merenggang oleh karena pengungsian yang berulang-kali, ternyata diikat kembali oleh rasa ingin bersama dan ikatan perasaan di antara mereka.

Karena masing-masing orang memiliki jaringan dan relasi eksternal, dalam pengungsian dan pembangunan hunian serta hantap relasi dan jaringan eksternal itu menjadi relasi dan jaringan komunitas. Informan menyatakan hal itu ketika kami wawancara secara mendalam. Ketika mengungsi, membangun hunian dan hantap, bahkan sekarang ketika mereka membesarkan *lavatour* di Pangukrejo dan Kinahrejo, semua itu dilakukan dengan eskalasi relasi dan jaringan personal menjadi relasi dan jaringan kelompok dan komunitas. Maka sumberdaya dan relasi menjadi

menguat, sampai mereka berhasil membeli tanah sendiri dari milik seorang pengusaha di Terban, Yogyakarta, dan kemudian dibangun oleh dana Program Rekompak yang berhasil mereka peroleh. Dalam kalimat negatif, tanpa relasi dan jaringan maka komunitas tidak akan cukup memiliki sumberdaya bersama dan memperoleh keuntungan bersama, sebagaimana Bourdieu sampaikan.

Ketujuh, **sosok pemimpin dan kepemimpinan** (*leader and leadership*). Bagaimana mereka ditolong dan didampingi oleh Pak Agus tidak terlepas dari sosok Mbah Maridjan yang telah dikenal secara dekat oleh Pak Agus ini. Kharisma dan peran Mbah Maridjan menjadi "magnet" bagi Pak Agus ini untuk tidak membiarkan komunitas Kinahrejo menderita karena bencana erupsi Merapi dan dampak yang mengiringinya. Di sinilah bertemunya sosok pemimpin dan kepemimpinan. Mbah Maridjan sebagai sosok yang dihargai dan dikagumi membawa Pak Agus memimpin jejaring dan relawan yang dimilikinya untuk mendampingi komunitas ini. Pak Agus memberikan tempat tinggal rumah dan tanahnya yang luas di Sleman untuk warga Kinahrejo. Ia mendirikan Posko Kemanusiaan untuk memperoleh

aneka bantuan, lalu mendampingi komunitas itu mengorganisir diri sebelum mereka pindah ke huntara dan huntap dan memberdayakan semua bantuan yang diterima bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari melainkan pula untuk rehabilitasi kehidupan mereka pasca bencana. Maka kedua tokoh ini adalah sosok pemimpin yang mendampingi warga, baik secara fisik dan langsung (Pak Agus) maupun simbolik dan kharismatik (sosok almarhum Mbah Maridjan). Mbah Maridjan adalah "ikon" dan "identitas" bagi warga Kinahrejo ini.

Kedelapan, **lembaga** (*institution*). Paguyuban yang didirikan warga, dengan dampingan Pak Agus dan PP Al Qodir (Kyai Masrur Akhmad), merupakan pelebagaan seluruh dimensi sumberdaya yang dimiliki warga. Melalui paguyuban inilah mereka menggabungkan aneka sumberdaya yang mereka miliki. Mereka melakukan kerja bukan hanya individual untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan juga kerja kolektif untuk menghantarkan komunitas mencapai kembali kehidupan mereka sebelumnya sebelum bencana. Kerja kelembagaan ini akan kuat bila mereka

memegang nilai-nilai bersama: kejujuran, keterbukaan, kerjasama, kesukarelaan, tolong-menolong, gotong-royong, dan sebagainya. Keberadaan paguyuban hingga sekarang, menunjukkan bahwa ada aneka aspek modal sosial yang menopangnya. Informan menyampaikan bahwa sampai sekarang paguyuban masih menerima sebagian keuntungan usaha para warga di lavatour untuk dana sosial bersama. Paguyuban ini pulalah yang dulu mengelola uang ratusan juta dari para penderma yang sebagian di antaranya mereka pakai untuk membeli tanah huntap. Pada titik ini, kita belajar bagaimana melembagakan kebersamaan dan kerjabersama ke dalam sebuah lembaga, yaitu paguyuban. Sebagaimana organisasi umumnya, paguyuban ini juga memiliki sejumlah pengurus dan anggota. Mereka melakukan *rembug* bersama untuk memutuskan nasib bersama dan rencana ke depan.

Demikianlah maka mereka dapat bertahan, meneruskan kehidupan dan membangun kehidupan dan mengembangkan apa yang telah mereka bangun melalui aneka aspek dari modal sosial yang mereka miliki. Modal sosial inilah yang mendasari pula ketika mereka

mengembangkan aneka usaha di area *lavatour* Ngrangkah, Pangukrejo dan Kinahrejo. Informan menyatakan bahwa rasa kebersamaan, ikatan sosial atau solidaritas, tolong-menolong dan jaringan⁶ memiliki peran besar dalam rehabilitasi ekonomi.

Sesudah mereka tinggal di huntara, dan kemudian diteruskan di huntap, mereka mulai penghidupan dari beberapa mata pencaharian lama dan baru. Mata-pencaharian lama mereka adalah pekebun, peternak dan berjualan *warungan* kecil-kecilan (makanan, minuman dan kelontong). Sedangkan pekerjaan barun adalah sebagai pengojek wisatawan yang hendak melihat bekas rumah Mbah Maridjan dan Kampung Kinahrejo, pedagang souvenir atau cinderamata (kaos, gantungan kunci, topi, foto, CD erupsi Merapi, buku tentang Merapi), warung makan dan minum untuk wisatawan *lavatour* (termasuk “resto”), tukang parkir dan penyewaan MCK. Dengan tetap mengelola ternak kelompok di huntara, mereka bekerja di beragam mata-pencaharian baru itu. Mereka

⁶ Warga menyebutnya: *channel*.

berdiskusi peluang usaha, kerjasama, kreasi baru untuk menarik wisatawan, dan berbagi rejeki dengan menawarkan peluang pencaharian kepada anggota komunitas yang mampu dan mau.

Jaringan dan relasi internal itu diperkuat oleh adanya relasi dan jaringan eksternal. Informan mengemukakan bahwa masukan dari relawan yang sudah lama berinteraksi dengan mereka, misalnya Bu Elisabeth Inandiak (berkebangsaan Perancis dan tinggal di Sleman), untuk mengadakan *tracking* bagi wisatawan asing, dan meminta warga lokal sebagai pemandunya, ternyata menjadi salah satu jenis usaha baru komunitas. Dari *tracking* berkala beberapa kali dalam sebulan ini mereka memunculkan sub-sub pekerjaan baru di dalam lintasan *tracking* ke arah rumah Mbah Maridjan dari Resto Merapi di sisi atas Pangukrejo yang berbatasan dengan Pelemsari itu. Para pejalan kaki ini mereka beri tawaran beberapa jenis lintasan: jauh atau dekat. Lintasan jauh berarti mereka akan berjalan kaki menyusuri batas luar Kinahrejo, dari bawah ke atas sampai lokasi bekas rumah Mbah Maridjan lalu turun ke bawah melalui sisi luar barat dusun dan sampai kembali

ke Resto Merapi. Sedangkan kalau lintasan dekat berarti mereka akan menyusuri jalan bukan di batas dusun melainkan yang berada agak ke tengah, sehingga jarak tempuh lebih pendek. Di setiap lintasan mereka adakan beberapa atraksi: (1) melihat film Merapi; (2) menerima minuman dan makanan tradisional; (3) berkunjung di bekas rumah *Mbah* Maridjan dan (4) menerima sajian makan siang menu lokal di Resto Merapi. Selama berjalan mereka diberi informasi oleh pemandu wisata, demikian juga ketika berhenti di beberapa tempat kunjungan. Semua aktivitas dan peran itu memiliki implikasi ekonomi bagi warga Kinahrejo. Semua warga yang menyediakan fasilitas akan menerima imbalan, yang sudah disatukan dengan biaya *tracking* per orang. Dengan demikian ikatan “kekinahrejoan” memberikan peluang pendapatan untuk para warga yang terlibat. Modal sosial membawa kreativitas, diserfikasi usaha, pendapatan dan peluang perbaikan ekoomi keluarga (bila mengelola keuangan dengan baik).

Ikatan sosial juga membawa mereka pada pengorganisasian jasa ojek, trail, jeep, warung, dan pemandu wisata. Setiap pengelolaan usaha bersama

mereka dasarkan pada modal sosial mereka. Meskipun anggota keanggotaan fluktuatif, namun masuk dan kelaurnya seseorang dari keanggotaan kelompok didasarkan oleh bertemunya pertimbangan kepentingan dan nilai individual dan kolektif. Kolektivitas sebagai korban bencana dan warga lokal menjadi basis pengorganisasian usaha itu. Jaringan antar jenis usaha, atau antarusaha yang sama, didasarkan pula oleh modal sosial ini, terutama relasi, jaringan dan kepercayaan karena saling diuntungkan oleh adanya kersajama penggunaan sumberdaya bersama atau timbal-balik. Modal sosial menjadi pembatas luar atau pengaman sumberdaya ekonomi komunitas lokal. Meskipun bernada negatif karena itu semua diutamakan untuk warga Kinahrejo dan sekitarnya, namun secara kemanusiaan dapat dipahami oleh karena mereka ingin menancapkan kedaulatan pada bumi di mana mereka dilanda bencana. Warga terdampaklah yang menerima keuntungan pertama dari berkah pasca bencana.

Mereka belajar dari fenomena tempat wisata Kaliurang yang pada akhirnya warga setempat hanya “menonton” atau “terpinggirkan” oleh investasi dari luar

yang modalnya tak dapat mereka saingi. Warga Kinahrejo (Pelemsari), Pangukrejo dan Ngrangkah tidak mau mengalami hal serupa. Modal sosial menjadi dasar mereka untuk “mengapling” lahan lavatour menjadi aneka usaha mereka. Dengan itu semua, uang dari wisatawan mereka “putar” untuk pemberdayaan ekonomi warga tempatan dan sekitar. Warga terdampak di desa lain, misalnya Kepuharjo, juga bergabung untuk memanfaatkan area itu untuk memperoleh pendapatan. Mereka memperbolehkan dengan tetap menjaga ikatan bahwa mereka semua adalah warga terdampak. Apakah ada pelaku usaha di luar itu? Tentu saja ada. Mereka melakukan investasi pada jasa sewa dan antar trail dan jeep. Namun secara kuantitas jumlah mereka ini kiranya adalah minoritas. Informan menyatakan bahwa peruntukan adalah untuk warga lokal. Mereka menerima dampak bencana erupsi maka kalau mereka pula menerima berkah pasca bencana Merapi adalah hal yang wajar dan *fair*.

Seluruh rehabilitasi ekonomi yang mereka rasakan, yang kata informan lain kiranya lebih baik daripada kehidupan sebelum bencana erupsi 2010,

kiranya turut menegaskan hal ini. Namun tidak semua warga terdampak merasakan rehabilitasi ekonomi yang sama. Warga Kinahrejo adalah yang paling merasakan dampak positifnya, sedangkan ia dan para saudara dan tetangga yang berasal dari Kampung Kaliadem (Kepuharjo) tidak mendapatkan berkah ekonomi sebesar warga Kinahrejo. Informan ini pun menikmati berkah dengan bekerja membuka warung di Pangukrejo, berkat mantan menantunya yang berasal dari Pelemsari (Kinahrejo). Namun ia membuka warung ketika hari libur atau akhir pekan. Selebihnya ia dan keluarga, demikian pula tetangga, lebih menjadi pekebun dan peternak. Secara demikian, dari cerita kecil ini, akses diperoleh karena ikatan kekerabatan dan sependeritaan.

Gambar 11. Mbah Petruk dalam Asap Letusan



Sumber: VIVA.Com, 4 November 2010, diakses 27 Oktober 2015

Selain modal sosial yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi, masyarakat meyakini secara kultural bahwa erupsi Merapi adalah kejadian rutin, peristiwa yang memang harus terjadi. Sebagian masyarakat bahkan percaya bahwa setiap kali meletus atau erupsi, Mbah Petruk, Sang Penunggu Merapi, mesti muncul membawa pesan-pesan yang bersangkutan pada persoalan masyarakat.

Bagaimana masyarakat menafsirnya? Media VIVA.Com, 4 November 2010, mewawancarai Dr.

Damarjati Supajar, profesor Filsafat, Universitas Gadjah Mada. Ia pun menafsir bahwa, "*Petruk dalam masyarakat Jawa khususnya dunia pewayangan dilambangkan sebagai rakyat. Namun ketika dimainkan Dalang, wajah atau hidung petruk selalu menghadap ke kiri ke arah dalang, bukan ke arah sebaliknya.*" Menurut Damarjati, jika wajah petruk sudah mengarah ke kanan, itu merupakan lambang kemarahan. Petruk yang dijadikan sebagai lambang rakyat yang marah rakyat terhadap pemimpinnya. Kemarahan rakyat akan sebuah penindasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksejahteraan yang telah dilakukan oleh para elite politik, elite yang bertingkah laku sewenang-wenang. Ia mengatakan bahwa: "*Arah wajah Petruk ke kanan itu memang mengarah ke arah selatan sisi Merapi yakni Sleman, Yogyakarta. Jadi luapan kemarahan itu akan lebih dikeluarkan ke arah Selatan.*"

Apa yang dikemukakan oleh Damarjati, kiranya, disetujui oleh banyak kalangan yang percaya. Dus, bencana Merapi dianggap sebagai perpanjangan, representasi dan sekaligus agen perubahan sosial. Ketika rakyat kecil ditindas, tak punya suara atau bahkan tak

mampu bersuara, maka gejala alam diyakini sebagai perlambang, simbol yang mewakili *wong cilik*, kaum kecil.

Demikianlah Merapi, tak hanya sebagai gunung, namun sosok yang senantiasa bersama orang kecil, yang memberi hidup, mengajak hidup dan selalu berdiri di pihak kaum kelas bawah, *kawulo alit*.

Mitos Mbah Petruk ini dibaca oleh Dove sebagai strategi kultural komunitas dalam menghadapi ketidakpastian bencana. Ancaman didomestifikasi menjadi kenormalan hidup, sehingga ancaman tidak membawa kecemasan-kecemasan dalam hidup keseharian.

Muara dari persepsi bencana masyarakat lereng Merapi, dengan demikian, tak hanya bencana alam, sosial, namun juga merasuk pada kesadaran individu, individual mindset. Dus, di sinilah temuan lapangan kami membuktikan bahwa kebangkitan warga dari keterpurukan bencana merupakan hasil dari persinggungan, dialektis antara struktur, modal sosial dan pengalaman, kesadaran individual. Dua hal inilah yang coba kami eksplorasi.

Seperti apakah strategi adaptasi warga pasca bencana: modal sosial dan pengalaman? Di manakah titik singgung antara modal sosial yang berbasis pada jejaring dan pengalaman atau kesadaran di level individu? Pendekatan baru di ranah ilmu pengetahuan, yang juga diadopsi oleh tradisi Sosiologi, kiranya penting dan mendesak: kajian "Neuro- Sosial".

Pembangunan konsep dan praksis modal sosial adalah kompleks, kepercayaan (*trust*) dan norma sebagai landasan dari modal sosial akan melintasi area politik sebagai problem kelembagaan, ekonomi sebagai problem biaya transaksi, dan norma sebagai problem sosiologis. Jika semua, politik, ekonomi dan sosial, diasumsikan berakar pada problem sosio-kultural, seperti digagas oleh Polanyi, maka sebuah tilikan mendalam perlu dilakukan. Dari manakah tingkah laku sosial yang *pro-sociality*, sebagai dasar pembangunan kepercayaan dan norma berjangkar? Apakah hambatan untuk berkembangnya tingkah laku yang *pro-sociality* di Indonesia?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, tulisan ini ingin mengenalkan kajian "baru" dalam disiplin Sosiologi: Neuro-Sosiologi, Sosiologi yang berdialog

dengan *Neurosciences*, sebagai upaya menjawab soal. Neuro-sosiologi menawarkan bahwa tingkah laku sosial berdialektik dengan sistem neural yang plastis. Dalam artian ini, tingkah laku sosial dideterminasi oleh sistem neural, dan sistem neural dibentuk oleh dinamika sosio-kultural yang melingkupi. Kiranya, dengan memahami relasi tersebut, jantung persoalan “modal sosial” di Indonesia bisa dibuka, ditemukan potensi dan hambatan-hambatannya.

Langkah konkret dalam penerapan konsep neuro-sosiologi adalah dengan mengeksplorasi kerja lapangan, menerjemahkan konsep-konsep neuro-sosial dalam perannya mengembangkan modal sosial dan kewirausahaan. Berbasis pada temuan lapangan, terbukti bahwa kemampuan kognisi individu dibentuk oleh dinamika struktur, dan sebaliknya kekuatan kognisi akan menggerakkan, mengkonstruksi kembali struktur. Individu-individu masyarakat lereng Merapi pasca bencana, mampu menyintas ketika aktor-aktor individu itu mengembangkan modal sosial, yang berjangkar pada kekuatan kognisi sekaligus struktur jejaring. Keduanya

berkelindan mendorong keputusan-keputusan berwirausaha

4.2. Peran Kewirausahaan terhadap Rehabilitasi Ekonomi

Masih terlalu awal untuk menyimpulkan peran kewirausahaan terhadap rehabilitasi ekonomi warga terdampak erupsi di Umbulharjo, dalam hal ini warga ang bermukim di Huntak Karangkendal. Apa yang berhasil kami deteksi adalah fenomena yang kami lihat dan rasakan dan apa yang kami dengar dari kesaksian dan pernyataan para informan. Yang jelas adaah bahwa rehabilitasi ekonomi telah terjadi. Ini didasarkan pada amatan dan informasi mengenai fasilitas rumah tangga mereka, alat transportasi, alat telekomunikasi, penghasilan dan keberlangsungan mata pencaharian mereka. Informan-informan yang berhasil kami temui dan wawancarai tidak ada yang menyatakan adanya penderitaan ekonomi di anantara warga. Hasil mereka cukup besar dari penambangan pasir dan batu saat awal bermukim, kemudian aneka usaha di area lavatour. Kat “lumayan” dalam hal pendapatan, kiranya mengafirmasi

penafsiran ini. Kata itu akhirnya berujung pada penafsiran bahwa mereka tidak berkekurangan secara ekonomi.

Semua itu tentu berasal dari besarnya pendapatan, hematnya pengeluaran, pengelolaan keuangan yang baik, dan pembelajaan uang secara cermat. Mereka membelanjakan hal-hal penting dan pokok bagi keluarga, termasuk penambahan modal. Seorang informan menyampaikan bahwa hal itu dilakukan dengan menambahkan dana untuk membeli motor trail setelah menjual sepeda motor biasa mereka, lalu dari trail mereka berusaha untuk membeli jeep. Kesemuanya itu untuk melakukan usaha jasa transportasi. Sebagian orang melakukan akumulasi kapital dengan memanfaatkan pinjaman bank setelah dihitung dengan cicilan per bulan ternyata hasil per bulan yang mereka dapat lebih dari cukup. Relawan mahasiswa pun menginformasikan jenis upaya ini. Kekurangan dana bisa juga diperoleh dengan meminjam dana Koperasi Susu Sarana Makmur di mana yang bersangkutan menjadi anggotanya, sebagaimana terungkap pada wawancara mendalam.

Aneka usaha itu dapat ditafsirkan sebagai upaya pemanfaatan diri dan lingkungannya untuk memulai dan/atau mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan lebih besar. Aneka gagasan diserap, kreasi dilakukan dan inovasi diciptakan untuk memperoleh peluang usaha baru. Dengan kata lain, itu adalah bagian upaya dari penuangan hasrat dan gagasan ke dalam realita, dari visi ke aksi, dalam rangka memulai dan/atau mengembangkan usaha. Itu senada dengan definisi ini: *“the process of identifying, developing, and bringing the vision to live”*, yang merupakan cerminan dari kewirausahaan. Mereka menghidupkan visi, pandangan, gagasan, inovasi, kreasi dan modifikasi gagasan lain ke dalam kehidupan, realita, kenyataan konkret. Mereka membaca peluang dengan menggerakkan neuro atau sistem syaraf otaknya. Mereka berpikir keras mencari inspirasi dan menemukan gagasan baru yang akan dicoba. Munculnya ojek, trail, jeep, resto, usaha cinderamata, tracking, jasa MCK, paguyuban komunitas, perbaikan pendapa di bekas rumah Mbah Maridjan, mengubah batu *“alihan”* (berpindah) menjadi *“alien”* (“mahkluk angkasa luar”),

menggali bunker, pengecoran jalur lintasan jeep di timur Dusun Petung sampai bawah Kaliadem, dan sebagainya, berawal dari kerja otak, kerja neural, untuk menemukan hal baru. Hal baru yang masih pada tataran gagasan, visi, lalu diwujudkan dengan kerja konkret, dengan bekerjasama, bergotong-royong dengan iuran bersama, yang semua itu berbasis pada modal sosial (*social capital*) yang telah mereka miliki dan jaga. Secara demikian, mereka sebenarnya telah memiliki semangat kewirausahaan yang dikombinasikan dengan modal sosial.

Gagasan individu yang baik kemudian secara sosial diduplikasi atau disetujui lalu menjadi milik kolektif. Motivasi dan gagasan personal bertemu dengan ekspektasi sosial yang telah memiliki basis modal sosial lalu melahirkan pengorganisasian kerja bersama. Kerja bersama ini baik berupa pengorganisasian komunitas, seperti paguyuban warga Kinahrejo, atau usaha jeep (yang telah ada lebih dari 6 kelompok), atau kelompok ojek dan trail, atau usaha lainnya, maupun kerja konkret dalam perbaikan infrastruktur fisik: pengecoran jalan, papan penunjuk arah, palang-pintu, pengumuman untuk

pengguna jalan, dan sebagainya. Aspek individual, sosial dan organisasional bertemu lalu melahirkan baik kewirausahaan konvensional untuk kepentingan pribadi dan kelompok, maupun kewirausahaan sosial di mana usaha dipakai untuk penyelesaian aneka problema komunitas, sebagaimana secara sepintas nuansanya tampak pada karya-karya paguyuban warga Kinahrejo/Pelemsari.

Meskipun demikian, usaha paguyuban itu tidak dapat secara persis dikatakan sebagai salah satu bentuk dari kewirausahaan sosial sebagaimana Muhammad Yunus sampaikan. Hal ini dikarenakan paguyuban tidak berperan seperti Grameen Bank yang memang secara kelembagaan berorientasi pada kewirausahaan sosial: memecahkan masalah-masalah sosial dengan jaminan layanan berkelanjutan yang didasarkan pada kerja “mesin bisnis”. Paguyuban komunitas Kinahrejo masih lebih condong untuk didefinisikan sebagai organisasi sosial daripada organisasi bisnis sosial. Memang benar dari organisasi ini dana bersama dari para donatur dikelola untuk membeli tanah secara kolektif dan didukung oleh Rekompak/JRF yang pada dasarnya

adalah instrumen pemerintah dalam penanggulangan dampak kebencanaan. Aneka bisnis atau usaha dilakukan oleh anggota komunitas dengan menjadikan paguyuban sebagai “ruang bersama” untuk bertukar gagasan, berbagi peluang, dan menyantuni anggota yang berkesuksesan, selain menyediakan dana pemenuhan kebutuhan fasilitas umum. Namun demikian, paguyuban itu sendiri bukanlah lembaga bisnis sosial yang berbadan hukum dan memiliki usaha untuk mengentaskan beragam orang dan komunitas, sebagaimana Grameen Bank di Bangladesh.

Oleh karena itu, kami cenderung memandang paguyuban itu bukan lembaga bisnis sosial melainkan organisasi komunitas atau sosial yang dipakai warga untuk menjalin kebersamaan lintas RT. Lingkup paguyuban itu terdiri dari 4 RT yang identik dengan RW. Dengan demikian, paguyuban itu tak ubahnya berlingkup RW. Berbeda dari RW yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah desa dan menangani administrasi kependudukan dan pembangunan warga sejauh merupakan program pemerintah dan program bersama warga, paguyuban ini merupakan kelanjutan

posisi dan perannya sebagai wadah warga bersama untuk membicarakan aneka hal, di luar administrasi kependudukan, kewargaan dan pemerintahan. Bila RW muncul dari instruksi dari atas, pemerintah, maka paguyuban ini muncul dari bawah atau usulan pendamping ketika warga masih menjadi pengungsi di Sleman.

Aneka usaha bisnis yang berbasis pada semangat dan praksis kewirausahaan berada di tangan pribadi ataupun kelompok. Bukan berada pada aras dan lingkup paguyuban. Namun demikian, untuk mengelola aneka kebutuhan sosial bersama, ada ketentuan warga bahwa sekian persen dari hasil usaha dimasukkan ke dalam kas paguyuban sebagai bagian dari upaya jaminan sosial. Maka, paguyuban dihidupi oleh warga, bukan paguyuban menghidupi warga sebagaimana masa pengungsian atau berdomisili sementara di hunian sementara. Sebab itu, paguyuban tidak punya usaha sendiri sebagaimana bisnis sosial. Paguyuban hanya menjadi wilayah sharing gagasan, keluhan, program, dan tabungan warga bersama, bukan penggerak usaha untuk pemenuhan kebutuhan warga. Secara demikian,

rehabilitasi ekonomi warga secara logis muncul dari keberhasilan aneka usaha yang digeluti warga. Basis rehabilitasi ekonomi bukan pada kolektivitas paguyuban, melainkan sebagai hasil upaya individu dan kelompok.

Namun rehabilitasi ekonomi juga mengkombinasikan upaya-upaya kewirausahaan sektor agraris dan non-agraris. Tidak semua hasil usaha dapat mencukupi kebutuhan ekonomi. Ini dikarenakan oleh beberapa hal. Pertama, usaha memperoleh peluang pendapatan signifikan ketika liburan dan akhir pekan. Usaha jeep tidak setiap hari memperoleh penumpang wisatawan, demikian pula pedagang tak selalu buka tiap hari, melainkan hanya hari libur dan akhir pekan. Bila ada pedagang atau aneka usaha lain buka seminggu tanpa henti maka pendapatan utama mereka ada pada akhir pekan dan liburan. Itulah sebabnya, dukungan sektor agraris, terutama ternak dan kebun masih penting.

Penanganan sektor agraris dan non-agraris itu dilakukan dengan pembagian waktu dan pekerjaan dengan anggota keluarga. Dari pembagian waktu, para informan menunjukkan bahwa pagi dan sore adalah waktu untuk mengurus ternak. Sedangkan menjelang

siang sampai sore hari adalah waktu untuk membuka usaha di area *lavatour*. Pembagian kerja secara seksis pun terjadi. Bila perempuan atau isteri mengurus dagangan di *lavatour* maka suami akan urus kebun dan ternak. Ada juga yang melakukan terbalik. Bila suami urus jasa sewa jeep, ojek, homestay di base camp maka isteri mengerjakan pekerjaan di kebun dan ternak, bahkan ada juga yang bekerja di sektor penambangan pasir: beri tiket dan menerima uang pembayaran dari truk pengambil pasir (*thoker*) atau meratakan pasir di atas bak truk (*ngrata*). Demikianlah maka sektor jasa di dunia pariwisata bersinergi dengan sektor agraris dan ekstraksi alam: penambangan pasir, dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Namun kewirausahaan bukanlah “surga”. Dalam dirinya tak hanya ada keindahan dan keberhasilan, namun juga kegagalan dan ketegangan, bahkan friksi. Di kalangan usahawan penyewaan jeep hal itu juga tergambarkan. Seorang informan menyatakan bahwa setiap organisasi punya keterbatasan dan pembatas: baik ketentuan, peraturan, spesifikasi jenis jeep maupun jumlah dan manajemen organisasi. Itulah sebabnya,

selalu ada pihak yang merasa tak diakomodasi kepentingan atau keinginannya. Namun seperti yang dikatakan Coser bahwa konflik itu bersifat fungsional, maka hal inipun mendorong yang bersangkutan untuk menemukan gagasan baru berdasarkan olah kreativitas. Pihak yang tak diakomodasi lalu memfasilitasi diri dan pihak lain yang berkepentingan sama untuk mendirikan grup usaha baru. Lalu mereka membuka *base camp* baru untuk penyewaan jeep. Untuk melayani wisatawan, mereka menawarkan hal lain yang juga dibutuhkan: pemandu, pilihan *track*, *homestay* atau penginapan dan warung di *base camp* itu. Mereka pun, seperti dikatakan Bourdieu, memadukan sumberdaya untuk memperoleh keuntungan bersama. Mereka melayani biro travel untuk membawa wisatawan yang difasilitasi dengan memberikan aneka tawaran dan tips. Singkat kata, friksi atau konflik atau kekecewaan menjadi energi ositif untuk berkreasi dalam membuka usaha baru. Tentu usaha ini memiliki persaingan dengan usaha serupa, baik persaingan secara terbuka, setengah terbuka maupun tertutup. Sebagaimana dunia intelejen melakukan penyadapan informasi, maka mereka pun memiliki

“intelejen bisnis” untuk mengetahui besaran tips untuk biro travel pembawa wisatawan, harga, diskon, layanan dan kemudahan yang diberikan. Kompetisi ini berbasis *mapping* data pesaing. Kompetisi membawa layanan lebih baik, harga lebih kompetitif dan efisiensi internal. Supaya tidak terjadi penurunan harga yang merugikan semua maka akhirnya dilakukan patokan harga untuk jenis layanan sewa jeep, Apa yang menjadi pembeda adalah kualitas layanan. Demikian pula harga untuk sopir yang mengoperasikan, pemberian layanan dan harga per antaran wisata dengan jenis track tertentu juga menjadi pembeda. Meskipun demikian total harga untuk wisatawan yang menyewa adalah standar,

Diversifikasi usaha pun terjadi. Ini dilakukan baik dalam jenis usaha tertentu maupun pada pemunculan usaha baru. Pada jenis usaha sewa jeep, misalnya, diversifikasi internal usaha sewa mobil ini terjadi dengan munculnya beberapa klub baru. Dari yang semula hanya satu klub jeep sekarang sudah ada 6 klub dengan variasi anggotanya dari 30-60 orang. Jeep yang dipakai pun bervariasi: toyota kanvas, toyota hardtop, american jeep (willys), mambo, landrover, atau

campuran. Sementara itu usaha ojek motor, dengan pola perkembangan serupa, lalu berkembang menjadi jasa sewa motor trail. Sedangkan untuk diversifikasi eksternal terjadi, di antaranya, munculnya usaha jasa tracking (melintasi Kinahrejo dengan berjalan kaki) sebagai pelengkap usaha ojek, trail, resto, dan sewa jeep. Warung penjual makanan dan minuman pun mengalami diversifikasi komoditi, misalnya, mereka menjajakan souvenir: gantungan kunci, foto Merapi, foto Mbah Maridjan, CD Bencana Merapi, kaos bergambar Merapi atau Mbah Maridjan, dan sebagainya. Kreativitas, modal, kemauan, jaringan dan keberanian untuk memulai menjadi basis munculnya diversifikasi usaha ini.

Demikianlah, semua usaha itu menjadi basis rehabilitasi ekonomi yang dilakukan dan dialami oleh warga terdampak. Bukan hanya warga Dusun Pelemsari, Pangukrejo dan Ngrangkah saja yang memperoleh "berkah" ekonomi lavatour tetapi warga sekitar juga memanfaatkan banyaknya pengunjung untuk menuai pendapatan bagi diri dan keluarganya. Warga sekitar itu berasal dari Dusun Kaliadem, Petung, Tangkisan, dan bahkan Kaliurang. Kewirausahaan secara umum

memberikan dampak positif bagi rehabilitasi ekonomi keluarga-keluarga kurban erupsi Merapi 2010 lalu. Seperti kehidupan warga Dusun Pelemsari yang secara umum kami amati di Huntap Karangkendal di mana mereka tinggal pasca bencana, secara umum mereka hidup layak dan mapan. Informan kunci kami pun merasakan bahwa dengan usaha penyewaan jeep yang dilakukannya ia merasakan lebih mudah memperoleh rejeki. Keluarga yang dulu bercerai-berai dalam masa pengungsian beberapa kali kini sudah utuh dan secara ekonomi tak kesulitan. Tampak dari pencermatan lapangan bahwa kewirausahaan memberikan sumbangan positif bagi rehabilitasi ekonomi keluarga terdampak ini. Demikian pula warga lain.

BAB 5

USULAN REKAYASA SOSIAL

5.1. Format Rehabilitasi Ekonomi Produktif Versi Pemerintah

Rekayasa pemerintah untuk daerah terdampak bencana dituangkan dalam “Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013” oleh Bappenas dan BNPB (Juni 2011). Mencermati apa yang tertuang pada rencana aksi (renaksi) itu, kita mendapati logika kerusakan dan kerugian yang harus dipulihkan melalui aksi tertentu secara terencana. Aneka kerusakan, kerugian dan aksi itu dibuat berdasarkan aspek tertentu. Dengan mencermati semua aspek yang ditulis, kita dapat membaca logika bahwa semua aspek kehidupan warga terdampak akan dapat diperbaiki melalui konsep “rehabilitasi dan rekonstruksi” (rehab-rekon).

Tulisan ini akan memfokuskan diri pada aspek rehabilitasi ekonomi, sebagaimana tertuang pada pertanyaan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, kami

perlu sampaikan apa yang dikemukakan BNPB dan Bappenas melalui tabel berikut ini sebagai pijakan awal:

Tabel 2.
Ikhtisar penilaian kerusakan dan kerugian pasca erupsi Merapi di Propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah

No.	Sektor/ Subsektor	Kerusakan (Rp. Juta)	Kerugian (Rp. Juta)	Total (Rp. Juta)	Prosentase
1	Permukiman	599.307,54	27.343,60	626.651,14	17,61%
2	Infrastruktur	581.534,13	125.937,97	707.472,10	19,88%
3	Ekonomi Produktif	403.065,92	1.289.445,25	1.692.511,17	47,57%
4	Sosial	89.427,93	33.044,27	122.472,20	3,44%
5	Lintas Sektor	12.030,00	396.728,00	408.758,00	11,49%
Total		1.685.365,52	1872499,09	3557864,61	100,00%

Sumber: BNPB, Februari 2011

Berdasarkan tabel di atas, total kerusakan dan kerugian sektor ekonomi produktif sebesar 1,692.511,17 (Rp. Juta). Khusus di D.I. Yogyakarta kerugian di sektor sebesar 623.711,26 (Rp. Juta), sedangkan kerusakannya sebesar 179.840,73 (Rp. Juta). Kerugian dan kerusakan ini melanda banyak lokasi, termasuk lokasi penelitian

ini, yaitu Padukuhan Pelemsari dan Pangukrejo (Desa Umbulharjo, Cangkringan). BNPB dan Bappenas membuat daftar seluruh padukuhan yang mengalami kerusakan dan kerugian karena erupsi Merapi.

Menurut BNPB dan BAPPENAS (Juni 2011, hal 88), strategi yang dipakai untuk menjawab kerusakan dan kerugian di atas pada sektor ekonomi produktif dilakukan melalui kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, kehutanan, industri kecil dan jasa pariwisata. Lebih lanjut, strategi itu dipecah ke dalam beberapa sasaran pemulihan sektor ekonomi produktif sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3

Sasaran Pemulihan Sektor Ekonomi Produktif

No	Komponen	Lokasi Relokasi	Strategi Mitigasi
1	Pertanian: Pembukaan lahan, penanaman, dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi baru	Sesuai sasaran REKOMPAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan kebijakan Pemerintah Daerah Sesuai sasaran	- Memperhatikan peta resiko bencana - Rencana pembukaan lahan pertanian, perkebunan perlu memperhatikan peraturan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan PP
2	Perkebunan: pembukaan lahan perkebunan, penanaman, dan pendampingan sebagai stimulan	REKOMPAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan kebijakan Pemerintah	

	mata pencaharian di lokasi baru	Daerah	No.24 th.2010
3	Peternakan: Pegantian ternak, pengadaan bibit ternak, penyelenggaraan kesehatan hewan, dan sosial usaha ternak sebagai stimulan mata-pencaharian di lokasi baru		- Memperhatikan pedoman garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, penguasaan sungai dan daerah bekas sungai - Apabila lokasi berdekatan dengan kawasan pemukiman maka perlu memperhatikan akses bagi pengangkutan hasil produksi ke pusat perniagaan - Rencana pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman Klaten, Boyolali, dan Magelang
4	Kehutanan: Pembukaan lahan hutan rakyat, penanaman dan pendampingan sebagai stimulan mata-pencaharian pada lokasi baru.		
5	Perdagangan, industri kecil dan jasa pariwisata: pembangunan pusat lingkungan sebagai sarana perniagaan di lingkungan permukiman	Sesuai sasaran REKOMPAK, Kementerian Pekerjaan Umum dan kebijakan Pemerintah Daerah	- Memperhatikan peta resiko bencana - Rencana pusat perniagaan dibangun sesuai rencana rinci kawasan sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Sleman Boyolali dan Magelang

komprehensif. Hampir semua sektor ekonomi produktif yang dilakukan masyarakat tempatan telah diakomodasi dan diintergrasikan secara lintas sektor dengan sejumlah sektor lain. Seluruh sasaran pemulihan ekonomi produktif dan komponen lintas sektor itupun didukung oleh sumberdaya manusia, finansial dan struktur birokrasi pemerintahan, di samping BNPB dan BPBD serta para pendamping yang direkrut melalui REKOMPAK atau program lain. Meskipun demikian, data lapangan kami menunjukkan ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk memperkuat rekayasa rehabilitasi ekonomi produktif itu.

5.2 Usulan Perbaikan Rekayasa Sosial: Rehabilitasi Ekonomi Produktif

Temuan kami menunjukkan bahwa komunitas warga terdampak memiliki kapasitas individual dan kolektif bila memiliki pendamping tetap yang berkomitmen kuat, setia dan berjejaring kuat. Apa yang kami sampaikan ini beranjak dari pengalaman komunitas warga Padukuhan Pelemsari, yang biasa disebut sebagai

orang Kinahrejo (kampung di mana Mbah Maridjan bermukim hingga wafat). Setelah sempat bercerai-berai karena erupsi terbesar pada dini hari 5 Nopember 2010, mereka akhirnya dapat berkumpul kembali ke rumah besar Pak Agus di Sleman. Di rumah inilah ke-82 KK berkumpul sampai mereka kembali ke lereng Merapi. Apa yang kami konsturksikan untuk menjadi usulan rekayasa sosial pada sektor ekonomi produktif pada tulisan akhir ini?

Pertama, meskipun format rekayasa rehabilitasi ekonomi yang diformulasikan pemerintah cukup komprehensif namun ternyata, dilihat dari sudut pandang kurban di Pelemsari ini, dampaknya tidak selengkap formulasi itu. Bantuan penggantian ternak yang mati, padat karya (*cash for work*) PNPM Mandiri, lahan huntara, biaya pembangunan rumah permanen (hunian tetap/huntap) beserta infra-struktur penyerta, dan jatah hidup (jadup) adalah yang paling mereka rasakan manfaat besarnya pasca mereka keluar dari barak pengungsian.

Kedua, format rekayasa rehabilitasi ekonomi di atas masih bernuansa subyek-obyek, pemerintah sebagai

Tabel 4. Usulan Rekayasa Sosial Bidang Ekonomi-Produktif

No	Komponen	Lokasi	Strategi Mitigasi
1	Peternakan: penggantian ternak mati, pemberian bibit ternak baru sesuai kesepakatan dengan warga penerima, bantuan kandang, dampingan kesehatan/perawatan hewan, dampingan manajemen kelompok dan petulisan keuangan kandang komunal	Huntara/Huntap dan lokasi kandang ternak komunal yang disepakati bersama	- Memperhatikan peta resiko bencana - Rencana Pembukaan lahan pertanian, perkebunan perlu memperhatikan peraturan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan PP No.24 th.2010 - Memperhatikan pedoman garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, penguasaan sungai dan daerah bekas sungai
2	Perkebunan: pembukaan lahan perkebunan, penanaman, dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi asal	Lokasi asal dan pemukiman baru	Apabila lokasi berdekatan dengan kawasan pemukiman maka perlu memperhatikan akses bagi pengangkutan hasil produksi ke pusat perniagaan
3	Pertambangan: penambangan pasir dan batu di aliran sungai dan lahan dengan mempertimbangkan mitigasi kebencanaan, kepentingan komunitas terdampak dan kesinambungan usaha, dengan	Aliran sungai dan timbunan material di lahan warga	Rencana pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang yang harus segera disesuaikan dan disahkan

	membatasi penggunaan alat berat.		
4	Jasa Pariwisata: inisiatif usaha baru oleh individu dan kelompok untuk rehabilitasi ekonomi pasca bencana dan kelanjutan upaya kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kepentingan komunitas dan terintegrasi dengan orientasi pembangunan daerah kabupaten setempat, dengan tetap memberikan prioritas pada komunitas warga terdampak erupsi sebagai pelaku usaha utama.	Lokasi asal dan sekitar sesuai dengan kebutuhan	- Memperhatikan peta resiko bencana - Dikelola oleh komunitas dengan basis pada modal sosial dan kearifan lokal - Usaha individu dilakukan di dalam kerangka pengelolaan bersama oleh komunitas - Manajemen komunitas pengelola usaha ditentukan secara bersama, otonom, terbuka dan saling-menguntungkan - Bantuan dan regulasi pemerintah diperlukan sejauh memperkuat ekonomi produktif warga terdampak - Pemerintah memberikan aneka kemudahan untuk tumbuhnya ekonomi produktif: akses modal usaha, perijinan, badan usaha, perbaikan infrastruktur dan pendampingan bila diperlukan
5	Perdagangan: inisiatif, pelaksanaan dan pengembangan usaha perdagangan dilakukan baik secara individual maupun bersama guna mendukung rehabilitasi ekonomi produktif kurban erupsi Merapi dengan memperoleh kemudahan akses modal usaha,	Lokasi asal, pemukiman baru, pusat perniagaan baru dan destinasi wisata	

	pendampingan, jaringan dan bantuan lain baik oleh pemerintah, pelaku usaha lain serta lembaga-lembaga masyarakat yang berkomitmen.		
--	--	--	--

Aneka usaha perbaikan ekonomi produktif di atas dilakukan dengan menyertakan pelaku individu, paguyuban warga, pemerintah setempat (pedukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten), dan pelaku lain yang berkomitmen dengan orientasi pada pemenuhan kepentingan warga sehingga mampu berperan sebagai pelaku usaha mandiri yang memiliki etos kewirausahaan berdasarkan tempaan situasi lapangan. Pendampingan diperlukan sesuai dengan kemauan dan kesepakatan warga. Bila pendamping dilakukan, maka hal ini perlu dilakukan secara intensif, kontinyu dan komprehensif sampai dengan komunitas warga mampu mandiri berusaha. Pendampingan tetap bersifat dialogis dan keputusan akhir tetap pada hasil musyawarah komunitas warga, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan kalkulasi, mendayagunakan aset dan jaringan individual

serta kolektif, mengetahui *passion* usaha mereka, dan menentukan arah dan tahapan melangkah, serta mekanisme interaksi antara usaha individual dan pengelolaan dana komunitas untuk kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif perlu dikerangkai dengan perspektif *eco-sociopreneurship* agar tetap ramah lingkungan dan komunitas sebagai modal awal dan bersama mereka. Ini perlu disampaikan bahwa monetisasi usaha tidak jarang berdampak pada keretakan sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, rekayasa ekonomi produktif diletakkan di dalam kerangka ekologi manusia dan basis sosial-budaya setempat.

5.3. Hikmah Pembelajaran (*Lessons Learnt*)

Berdasarkan informasi lapangan, ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan dalam membangun kewirausahaan, memperkuat modal sosial dan melakukan rehabilitasi ekonomi tanpa mengorbankan modal sosial.

Pertama, pengorganisasian sosial. *Lavatur* yang mengambil lokasi di Dusun Pelemsari dan Pangukrejo

			• Di selenggarakan berdasarkan skala dan radius pelayanan • Perhatikan pedoman konstruksi bangunan tahan gempa
--	--	--	---

Sumber : BNPB dan Bappenas, April 2011

Mencermati tabel di atas dan sekaligus mempertimbangkan data lapangan yang kami temukan, hal tersebut kiranya perlu mendapatkan masukan perbaikan. Meskipun demikian, pemerintah sebenarnya telah berusaha untuk mengintegrasikan sejumlah sektor ke dalam satu kesatuan, yaitu melalui strategi lintas sektor. Menurut BNPB dan Bappenas (Juni, 2011), strategi lintas sektor ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan dalam pemulihan lintas sektor sub bidang pemerintahan keamanan dan ketertiban dalam rehabilitasi dan rekontruksi. Masih

menurut BNPB dan Bappenas (Juni 2011, hal. 90),

komponen lintas sektor ini terdiri dari:

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan kepada penghuni hunjara dan penduduk di lokasi pemukiman baru
2. Pemutakhiran database kependudukan
3. Pembangunan prasarana pemerintahan, keamanan, dan ketertiban sesuai RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang
4. Desiminasi rencana kontijensi dan SOP kesiapsiagaan masyarakat yang masih bertempat tinggal di KRB (Kawasan Rawan Bencana) III
5. Penguatan sistem peringatan dini (*early warning system*) erupsi, gempa bumi, dan banjir lahar dingin kepada masyarakat yang masih bertempat tinggal di kawasan rawan bencana.
6. Pemutakhiran batas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)

Secara umum, rekayasa sosial sektor ekonomi produktif versi pemerintah ini telah cukup

subyek dan warga terdampak sebagai obyek, sehingga program tidak secara maksimal memberdayakan kurban erupsi, meskipun di dalam format itu sudah tertulis bahwa aneka program itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas warga terdampak.

Ketiga, rehabilitasi ekonomi bertautan dengan etos kewirausahaan pelaku, maka program yang memperkuat kapasitas subyeklah yang akan bermanfaat besar. Sementara itu, etos kewirausahaan ini hanya akan kuat bila berbasis pada modal sosial komunitas warga dan peluang usaha pada konteks ekologis di mana mereka bertempat tinggal. Namun hal ini juga tidak bersifat serta-merta, melainkan dalam format *trial and error*, sehingga pendamping yang mampu membawa mereka ke dalam diskusi untuk menemukan problem solving dan membuka peluang baru bagi ikhtiar "*initiative and enterprise*" lah yang akan sungguh membantu warga terdampak untuk merehabilitasi ekonomi mereka. Kondisi ketidak-pastian (*uncertainty*) mereka membutuhkan ethos kewirausahaan untuk menemukan peluang, memanfaatkannya, mengalirkan sumberdaya dan jaringan dan memperoleh keuntungan

dari peluang itu melalui usaha yang berhasil mereka inisiasi, sampai mereka dapat memapankan usaha itu secara berkesinambungan. Oleh karena itu, hal ini berada di dalam dinamiki proses di dalam lingkup ruang dan waktu yang tidak cukup hanya diterapi dengan program beberapa kali intervensi dan akan berhasil, meskipun telah memetakannya dalam beberapa sektor, sebagaimana format rekayasa pemerintah di atas. Format di atas sudah baik dan lengkap, namun tidak akan cukup kalau tujuannya dalah merehabilitasi ekonomi warga. Fasilitas diperlukan tetapi elan-vital dan etos pelakulah yang akan menentukan apakah fasilitas dan bantuan itu akan bermanfaat seterusnya atautkah berhenti pada fase tertentu. Maka, rehabilitasi kapasitas warga terdampak di dalam konteks pasca bencana di dalam ruang geografis dan demografis kehidupan mereka inilah yang juga diperlukan. Bukan hanya fasilitas dan bantuan, tetapi juga pendampingan kapasitas secara kontinyu sampai mereka berhasil mandiri inilah yang juga diperlukan.

Berdasarkan beberapa hal itu, maka kami perlu sampaikan usulan sebagai berikut sebagai pelengkap:

Tabel 4. Usulan Rekayasa Sosial Bidang Ekonomi-Produktif

No	Komponen	Lokasi	Strategi Mitigasi
1	Peternakan: penggantian ternak mati, pemberian bibit ternak baru sesuai kesepakatan dengan warga penerima, bantuan kandang, dampingan kesehatan/perawatan hewan, dampingan manajemen kelompok dan petulisan keuangan kandang komunal	Huntara/Huntap dan lokasi kandang ternak komunal yang disepakati bersama	- Memperhatikan peta resiko bencana - Rencana Pembukaan lahan pertanian, perkebunan perlu memperhatikan peraturan pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan PP No.24 th.2010 - Memperhatikan pedoman garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, penguasaan sungai dan daerah bekas sungai
2	Perkebunan: pembukaan lahan perkebunan, penanaman, dan pendampingan sebagai stimulan mata pencaharian di lokasi asal	Lokasi asal dan pemukiman baru	Apabila lokasi berdekatan dengan kawasan pemukiman maka perlu memperhatikan akses bagi pengangkutan hasil produksi ke pusat perniagaan
3	Pertambangan: penambangan pasir dan batu di aliran sungai dan lahan dengan mempertimbangkan mitigasi kebencanaan, kepentingan komunitas terdampak dan kesinambungan usaha, dengan	Aliran sungai dan timbunan material di lahan warga	Rencana pemanfaatan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan merupakan bagian dari RTRW Kabupaten Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang yang harus segera disesuaikan dan disahkan

	membatasi penggunaan alat berat.		
4	Jasa Pariwisata: inisiatif usaha baru oleh individu dan kelompok untuk rehabilitasi ekonomi pasca bencana dan kelanjutan upaya kesejahteraan keluarga dengan memperhatikan kepentingan komunitas dan terintegrasi dengan orientasi pembangunan daerah kabupaten setempat, dengan tetap memberikan prioritas pada komunitas warga terdampak erupsi sebagai pelaku usaha utama.	Lokasi asal dan sekitar sesuai dengan kebutuhan	- Memperhatikan peta resiko bencana - Dikelola oleh komunitas dengan basis pada modal sosial dan kearifan lokal - Usaha individu dilakukan di dalam kerangka pengelolaan bersama oleh komunitas - Manajemen komunitas pengelola usaha ditentukan secara bersama, otonom, terbuka dan saling-menguntungkan - Bantuan dan regulasi pemerintah diperlukan sejauh memperkuat ekonomi produktif warga terdampak - Pemerintah memberikan aneka kemudahan untuk tumbuhnya ekonomi produktif: akses modal usaha, perijinan, badan usaha, perbaikan infrastruktur dan pendampingan bila diperlukan
5	Perdagangan: inisiatif, pelaksanaan dan pengembangan usaha perdagangan dilakukan baik secara individual maupun bersama guna mendukung rehabilitasi ekonomi produktif kurban erupsi Merapi dengan memperoleh kemudahan akses modal usaha,	Lokasi asal, pemukiman baru, pusat perniagaan baru dan destinasi wisata	

	pendampingan, jaringan dan bantuan lain baik oleh pemerintah, pelaku usaha lain serta lembaga-lembaga masyarakat yang berkomitmen.		
--	--	--	--

Aneka usaha perbaikan ekonomi produktif di atas dilakukan dengan menyertakan pelaku individu, paguyuban warga, pemerintah setempat (pedukuhan, desa, kecamatan dan kabupaten), dan pelaku lain yang berkomitmen dengan orientasi pada pemenuhan kepentingan warga sehingga mampu berperan sebagai pelaku usaha mandiri yang memiliki etos kewirausahaan berdasarkan tempaan situasi lapangan. Pendampingan diperlukan sesuai dengan kemauan dan kesepakatan warga. Bila pendamping dilakukan, maka hal ini perlu dilakukan secara intensif, kontinyu dan komprehensif sampai dengan komunitas warga mampu mandiri berusaha. Pendampingan tetap bersifat dialogis dan keputusan akhir tetap pada hasil musyawarah komunitas warga, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan kalkulasi, mendayagunakan aset dan jaringan individual

serta kolektif, mengetahui *passion* usaha mereka, dan menentukan arah dan tahapan melangkah, serta mekanisme interaksi antara usaha individual dan pengelolaan dana komunitas untuk kesejahteraan bersama. Dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif perlu dikerangkai dengan perspektif *eco-sociopreneurship* agar tetap ramah lingkungan dan komunitas sebagai modal awal dan bersama mereka. Ini perlu disampaikan bahwa monetisasi usaha tidak jarang berdampak pada keretakan sosial dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, rekayasa ekonomi produktif diletakkan di dalam kerangka ekologi manusia dan basis sosial-budaya setempat.

5.3. Hikmah Pembelajaran (*Lessons Learnt*)

Berdasarkan informasi lapangan, ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya untuk perbaikan ke depan dalam membangun kewirausahaan, memperkuat modal sosial dan melakukan rehabilitasi ekonomi tanpa mengorbankan modal sosial.

Pertama, pengorganisasian sosial. *Lavatour* yang mengambil lokasi di Dusun Pelemsari dan Pangukrejo

dikelola secara bersama melalui sebuah paguyuban. Namun, menurut informasi, bagaimana hasil kerja paguyuban itu berkontribusi secara ekonomi bagi setiap dusun? Ini yang perlu ditingkatkan agar tidak mengikis kepercayaan, kohesi sosial dan kerjasama warga kedua dusun yang telah berjalan.

Kedua, lokasi usaha. Ketika warga Pelemsari membangun Huntap Karangkendal, sejumlah orang yang dulu mengawali usaha di *lavatour* harus bekerjasama membangun huntap mereka. Namun, selama mereka mengerjakan huntap, lokasi usaha yang telah mereka rintis ternyata telah dipakai oleh orang lain, sehingga ketika mereka selesai membangun huntap, mereka tidak lagi dapat menempati lokasi usaha semula. Penataan lokasi dan hak usaha seperti ini perlu menjadi pembelajaran bersama ke depan.

Ketiga, mengamati area *lavatour*, kebersihan dan pengelolaan sampah belum optimal. Wisatawan dan aneka usaha setiap hari selalu menghasilkan sampah. Meskipun Huntap Karangkendal telah memulai, namun pengelolaan sampah di area *lavatour* kiranya belum dikelola dengan optimal. Hal ini menjadi inspirasi bagi

pengelolaan bank sampah ke depan. Bila warga telah sibuk dengan usaha masing-masing maka kegiatan ini dapat dikelola dengan bekerjasama dengan pihak desa melalui penempatan Bank Sampah sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kebersihan lokasi wisata dari sampah akan menjadi bagian layanan bagi para wisatawan yang datang, bahkan aneka kerajinan dari bekas sampah dapat menjadi souvenir lokal yang dapat ditawarkan bagi para wisatawan.

5.4. Praktik Baik (*Best Practice*)

Berdasarkan informasi lapangan, praktek terbaik yang dapat diduplikasi dan dicobakan pada komunitas dampak bencana adalah perlunya pendamping tetap yang berkomitmen, berjejaringan kuat dan mampu membangun posko kemanusiaan untuk mencukupi para pengungsi selama mereka di pengungsian. Apa yang dialami oleh komunitas Padukuhan Pelemsari dan RT teratas dari Pedukuhan Pangukrejo selama di lokasi pengungsian Sleman sampai berhasil membangun Huntap Karangkendal. Pendamping menjadi fasilitator tukar-pikiran beberapa orang inti di komunitasnya untuk

mencari ide-ide baru dalam mengangkat kehidupan warga pasca bencana. Komunitas lalu didampingi dalam membentuk paguyuban, mengelola dana bersama, mendistribusikan dana bantuan untuk para anggota komunitas (per KK), dan memikirkan usaha-usaha baru di lokasi asal.

Warga padukuhan ini menjadi komunitas pertama di seluruh lereng Merapi yang berhasil membangun huntap dengan membeli lahan sendiri secara kolektif bernilai ratusan juta rupiah. Dengan memiliki lahan sekitar 1 hektar, mereka lalu mengajukan proposal kepada REKOMPAK agar mendapatkan dana pembangunan rumah. Pemerintah, via REKOMPAK, menyediakan dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk hunian tetap untuk membangun rumah-rumah warga yang mau melakukan relokasi dan telah memiliki lahan sendiri. Oleh karena itu, dengan lahan itu, warga padukuhan ini kemudian didanai dan didampingi oleh REKOMPAK membangun huntap yang kini telah mereka tempati itu. Mereka menjadi komunitas pertama yang memiliki huntap dengan lahan mandiri.

Sampai sekarang paguyuban itu masih bekerja untuk menerima sebagian hasil usaha para warga. Hasil yang mereka kumpulkan dipakai untuk dana sosial dan keperluan lain yang disepakati bersama. Pengelola paguyuban mewakili seluruh warga di huntap. Struktur ini berbeda dari struktur pedukuhan, RW dan RT setempat, tetapi bekerjasama dengan struktur organisasi spasial itu.

Berdasarkan pengalaman paguyuban ini, komunitas warga terdampak memang perlu memiliki sejumlah orang inti yang memikirkan nasib bersama. Mereka menjadi tulang punggung (*backbone*) bagi paguyuban warga itu. Dalam oengalaman paguyuban ini, jumlah orang ini berkisar antara 5-6 orang, tetapi sungguh altruistik (berjiwa sosial) berkomitmen, pantang-menyerah, mampu melihat peluang, mengembangkan jaringan dan memanfaatkan apa yang mungkin bagi kepentingan bersama. Bersama mereka ini, ada pendamping tetap. Dalam kasus mereka, paguyuban memiliki Pak Agus dan Pondok Pesantren al-Qodir (KH. Masrur Akhmad) yang menjadi pendamping tetap dan menyediakan rumah di Sleman untuk menjadi

lokasi pengungsian mereka, dan sekaligus mendirikan posko kemanusiaan.

Tim kecil itulah yang memikirkan dan mencari tanah yang aman dari aliran dan limpahan material erupsi. Mereka pula yang mencari informasi pemilik tanah, bernegosiasi dan membelinya, sampai dengan pengurusan akta notaris per KK pemilik lahan. Mereka pula yang menjalin kontak dengan REKOMPAK, sekaligus mengawasi proses pembangunan huntap, berikut fasilitas umum yang dibutuhkan. Mereka pula yang mau berkorban banyak dengan tidak bekerja di area lavatour karena memastikan proses pembangunan huntap berjalan lancar, termasuk tulisan bertahap kepada REKOMPAK dan pengurusan dana serta pengadaan material dan pemborong serta tukang bangunan. Tanpa ada tim kecil dan pendamping yang bekerja maksimal maka paguyuban tidak akan bekerja dengan baik. Format inilah yang diperlukan oleh paguyuban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan paparan seluruh Bab di atas, apa yang bisa kami simpulkan? Temuan sementara itu akan disampaikan berikut ini.

Pertama, warga terdampak di Desa Umbulharjo, yaitu mereka yang terkena dampak erupsi Merapi, terutama yang berasal dari Dusun Pelemsari (yang kini bermukim di Huntap Karangkendal) telah berhasil melakukan rehabilitasi ekonomi.

Kedua, rehabilitasi ekonomi itu ternyata dilakukan dengan dukungan basis modal sosial yang mereka miliki. Wujud modal sosial itu adalah (1) kohesi atau ikatan sosial, (2) solidaritas, (3) gotong-royong atau tolong-menolong, (4) sistem nilai bersama, (5) relasi dan jaringan, (6) saling percaya, (7) pemimpin dan pemimpin serta (8) lembaga.

Ketiga, kewirausahaan juga memiliki peran positif dalam rehabilitasi ekonomi warga terdampak. Para warga berhasil membawa gagasan, cita-cita, impian ke dalam realita, *from vision to reality*, dengan memanfaatkan aneka modal sosial yang mereka miliki.

Kewirausahaan itu memerlukan aneka keterampilan yang dimiliki warga: (1) keterampilan dalam komunikasi; (2) teknologi (mobil, motor dan ICT); (3) gagasan dan usaha; (4) kreativitas, kreasi dan inovasi; (4) pemecahan masalah; (5) kesadaran diri; (6) perencanaan dan pengorganisasian. Aneka keterampilan ini secara bervariasi dimiliki para warga warga dalam memulai dan mengelola usaha mereka untuk merehabilitasi ekonomi. Aneka usaha mereka secara umum adalah: (1) jasa antar ojek, trail, jeep; (2) warung makanan/minuman; (3) penjualan aneka souvenir; (4) jasa guide; (5) jasa parkir; (6) jasa MCK; dan (7) jasa penginapan.

Keempat, antara modal sosial dan kewirausahaan memiliki keterkaitan erat dan kemudian keduanya dipakai berbarengan dalam praksis perbaikan kehidupan untuk melalui rehabilitasi ekonomi.

Kelima, meskipun modal sosial warga kuat, namun praksis usaha untuk kepentingan ekonomi tidak imun dari persaingan dan friksi. Meskipun secara umum ciri-ciri yang berbasis modal sosial itu sangat kentara di kalangan warga, namun ekspresi persaingan dan kekecawaan dalam dunia usaha pun ditemui pula.

Saran apa yang bisa kami sampaikan? Sampai dengan perkembangan kemajuan riset ini, kami belum menemukan saran yang kontributif baik bagi perkembangan akademik maupun kebijakan. Untuk kepentingan riset maupun komunitas tempatan kami juga belum menemukan saran yang terformulasikan. Kami berharap pada tulisan akhir nanti saran telah berhasil kami susun sehingga dapat disampaikan kepada para pihak terkait dan untuk kepentingan akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri, "Peringatan, Cobaan, dan Takdir: Politik Tafsir Bencana Merapi", *Masyarakat Indonesia*, Jilid XXVI, No. 1, 2000
- Bourdieu, Pierre., 'The Forms of Capital', in J. G. Richardson (ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1986.
- Coleman, James., *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass.: Belknap Press. 1990
- Dove, Michael R., *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, Jakarta, YOI, Nopember 1985.
- During, Simon (ed.), *The Cultural Studies. Reader*, London and New York, Routledge, Third Edition, 2007.
- Falk, Ian and Sue Kilpatrick, "What Is Social Capital? A Study of Interaction in a Rural Community", in *Sociologia Ruralis*, Vol. 40, No. I, January 2000.
- Franks, David, "The Neuroscience of Emotions," dalam Jan E. Stets & J.H. Turner (eds.), *Handbook of The Sociology of Emotions*. New York, Heidelberg, London: Springer, 2006.p. 38-60.
- _____, *Neurosociology: The Nexus Between Neuroscience and Social Psychology*. New York, Heidelberg, London: Springer, 2010.

- Franks, David & J. Turner (eds.), *Handbook of Neurosociology*, New York, Heidelberg, London: Springer, 2013.
- Franks, David, "Relationship Between Neurosociology, Foundational Social Behaviorism, and Currents in Symbolic Interaction," dalam David Franks & J. Turner (eds.), *Handbook of Neurosociology*, New York, Heidelberg, London: Springer, 2013.p. 139-148.
- Geertz, Hildred, *The Javanese Family. A Study of Kinship and Socialization*, USA, The Free Press of Glencoe, Inc., 1961.
- Halpern, David., *Social Capital.*, London: Polity Press. 2005.
- Harwanto, Agustinus, "Budaya, struktur dan pelaku", dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (editor), *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2005
- Isa, Muzakar, "Analisis Kompetensi Kewirausahaan, Orientasi Kewirausahaan dan Kinerja Industri Mebel", *Jurnal BENEFIT Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2011.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat, 1972
- Lakoff, George, "Neural Social Science," dalam David Franks & J. Turner (eds.), *Handbook of Neurosociology*, New York, Heidelberg, London: Springer, 2013.p. 9-27.

- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Nugroho, Y, *Does the Internet Transform Civil Society? The Case of Civil Society Organisations in Indonesia*, PhD Thesis, Manchester, The University of Manchester, 2007.
- Nasdian, Fredian Tonny, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta, Yayasan Obor, 2014.
- Olson, Gary, *Empathy Imperiled Capitalism, Culture, and the Brain*, New York, Heidelberg, London: Springer, 2013.
- Olson, Mancur, *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1965.
- Paripurno, ET, Heru Santoso Setiabudi, FM Nawitaningrum, Didik Raharyono dan Sigit Widdiyanto, *Merapi Bertutur*, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Kappala Indonesia dan PSMB UPN, 2006
- dan Sigit Widdiyanto, *Hidup Nyaman Bersama Ancaman Letusan Gunung Merapi*, Yogyakarta, Oxfam dan Kappala Indonesia, 2003.
- , "Mengenal Gunungapi", dalam Sigit Purwanto (Peny.), *Modul Wajib Latih. Penanggulangan Bencana Letusan Gunungapi*, Yogyakarta, Forum Merapi, 2008.

- Parmanto, Heri, *Penambangan Pasir Merapi. Studi Kasus Penambangan Pasir dan Batu di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Tahun 1985-2005*, Skripsi tak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2007.
- Pasag Merapi, Kappala Indonesia, Dream UPN Veteran Yogyakarta, *Usulan Rancangan Pengelolaan Kawasan Merapi. Konservasi Alam Berbasis Komunitas dengan Perspektif Manajemen Bencana dalam Konteks Otonomi Daerah*, Lereng Merapi, Pasag Merapi bekerjasama dengan Kappala Indonesia Dream UPN Veteran Yogyakarta dan Oxfam, Maret 2003
- Petersen, Michael bang, A. Roepstorff dan Soren Serritzlew, "Social Capital in the Brain," dalam Svendsen, Gert Tinggaard & G.L. Haase Svendsen (eds.), *Handbook of Social Capital*. Cheltenham, Edward Elgar, 2009. p. 75-92.
- Pramono, Suryo Adi dan Mario Antonius Birowo (Ed.), *Hidup Nyaman Bersama Ancaman. Pengalaman Radio Komunitas Lintas Merapi, Klaten, Jawa Tengah*, Yogyakarta, LPPM UAJY, 2012.
- Pranowo DS, Handojo Adi, *Manusia dan Hutan: Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung Merapi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1985
- Priyanto, Sony Heru, "Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat", Jurnal

Andragogia Jurnal PNFI/Volume 1/Nomor 1, November 2009.

P.M. Laksono, "Persepsi Setempat dan Nasional Mengenai Bencana Alam: Sebuah Desa di Gunung Merapi", dalam Michael R. Dove, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, Jakarta, YOI, Nopember 1985

Reyna, Stephen, *Connections: Brain, Mind and Culture in a Social Anthropology*. London: Routledge 2002.

Ritchie, Jane and Jane Lewis (eds.), *Qualitative Research Practice. A Guide for Social Science Students and Researchers*, 3rd reprinted, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage Publications, 2005.

Herry Santoso, *Perlawanan di Simpang Jalan. Kontes harian di desa-desa sekitar hutan di Jawa*, Yogyakarta, Damar, 2004.

Triyoga, Lucas Sasongko, *Manusia Jawa dan Gunung Merapi. Persepsi dan Kepercayaannya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1991

Weber, Max., *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tuebingen, 1922.

Wisnubroto, Al., dkk., "Respon dan Akomodasi Regulasi terhadap Aspirasi Berbasis Kearifan Lokal Warga Penolak Program Relokasi di Kecamatan Cangkringan, Sleman, DIY dan

Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah", *Tulisan Penelitian (Riset Unggulan Perguruan Tinggi Ditjen Dikti)*, PSHD UAJY, Nopember 2012.

Yin, Robert K., *Case Study Research. Design and Method*, 2nd Edition, Thousand Oaks, London, New Delhi, Sage Publications, 1994.

BIODATA PENULIS

Suryo Adi Pramono

Lahir di Surakarta, 26 September 1965. Ia menamatkan studi S1 pada jurusan hubungan internasional universitas gadjah mada (1993) dan S2 pada program pascasarjana sosiologi universitas Indonesia (2002). Ia pernah mengikuti *short-course* pada *Islamic Studies and Muslim-Christian Relations*, Hartford Seminary, CT, USA (1997). Kini ia sedang menyelesaikan studi S3.

Sejak 1 Desember 1993 ia mengajar pada FISIP UAJY. Ia pernah menjadi Pembantu Dekan III, Dekan FISIP, serta Sekretaris Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) UAJY. Kini selain mengajar pada Program Studi Sosiologi FISIP UAJY dan Program Magister Teologi Universitas Sanata Dharma (2012-2014), ia menjadi Kepala PSHD UAJY (2014-kini).

Ia aktif melakukan riset di lereng Gunung Merapi sejak 2002. Beberapa artikel telah dipublikasikan baik oleh Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), LPPM UAJY maupun Laboratorium Sosiologi FISIP UAJY. Riset sebelumnya berkaitan dengan sosiologi politik, terutama mengenai Partai Politik, LSM dan KSM, Kebijakan Publik, dan Kebencanaan. Dengan dana dari UAJY, Ditjen Dikti dan Yayasan Tifa, sejak Januari 2015 ia bersama tim sedang menyelesaikan riset mengenai advokasi kebijakan pembangunan apartemen dan hotel, rehabilitasi ekonomi pasca erupsi dan pengurangan risiko konflik/kekerasan bernuansa keagamaan.

Bambang Kusumo Prihandono

Lahir di Gunungkidul 26 September. Setelah menamatkan pendidikan menengah di Kolese De Britto, Yogyakarta, melanjutkan studi ilmu sosial pada Jurusan Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus tahun 1994. Tahun 2000-2004 melanjutkan studi di Westfaelische-Wilhelms Universitaet Muenster, Jerman di bawah bimbingan Prof. Dr. Jos Platenkamp, Anthropolog dan Prof. Hans Wienold, Sosiolog.

Kini, sehari-hari, bekerja sebagai staf pengajar Program Studi Sosiologi (Bisnis & Media), Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Minat dan subjek pengajaran: Teori Sosiologi, Sosiologi Media, Sosiologi Budaya, Neuro-Sosiologi, Multikulturalisme, Ekonomi Kreatif dan Metodologi. Publikasi ilmiah telah ditulisnya dalam Bahasa Indonesia maupun Jerman, seperti dalam *Suedostasien Journal*, Koeln.

Stefanus Nindito

Lahir di Yogyakarta pada 31 Januari 1974 dan menyelesaikan sarjana S1 di jurusan sosiologi pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1999. Selanjutnya meneruskan studi pasca sarjana dan selesai pada Universitas yang sama pada tahun 2004.

Peneliti juga menulis artikel jurnal dengan tentang fenomenologi dan gerak sosial diantaranya tahun 2005 artikel dengan judul Fenomenologi Alfred Schtuz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas. Selanjutnya pada tahun 2007 dengan judul Perjalanan Pemaknaan Alfred Schutz. Judul lain terkait dengan fenomenologi dengan judul Fenomenologi Media : Pencarian terhadap Pertautan Makna dalam Dunia Sosial

Media pada tahun 2008. Selain itu juga peneliti menulis tentang gerakan sosial dan diterbitkan oleh penerbit atma jaya 2012 tentang Wacana Tubuh dalam Pornogafi.

Peneliti mengajar di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta mulai 2001. Ia mengajar mata kuliah sosiologi politik, sosiologi bencana, lingkungan, masyarakat, kewirausahaan dan manajemen sumber daya manusia.
